

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT DI KABUPATEN
LABUHAN BATU**

TESIS

Oleh

Nama : NURMALA HASIBUAN

NPM : 1620050026

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PENGESAHAN

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN
LABUHAN BATU**

NURMALA HASIBUAN
1620050026

KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang
Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)

Pada Hari Kamis, Tanggal April 2018

Panitia Penguji

1. Dr. Irfan S.E., M.M 1.
2. Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, Ak, CA 2.
3. Dr. Widia Astuty, SE, M.Si, QIA, Ak, CA CPAI 3.
4. Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, Ak, CA 4.
5. Hj. Hafsah, SE, M.Si 5.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : NURMALA HASIBUAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620050026
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, April 2018

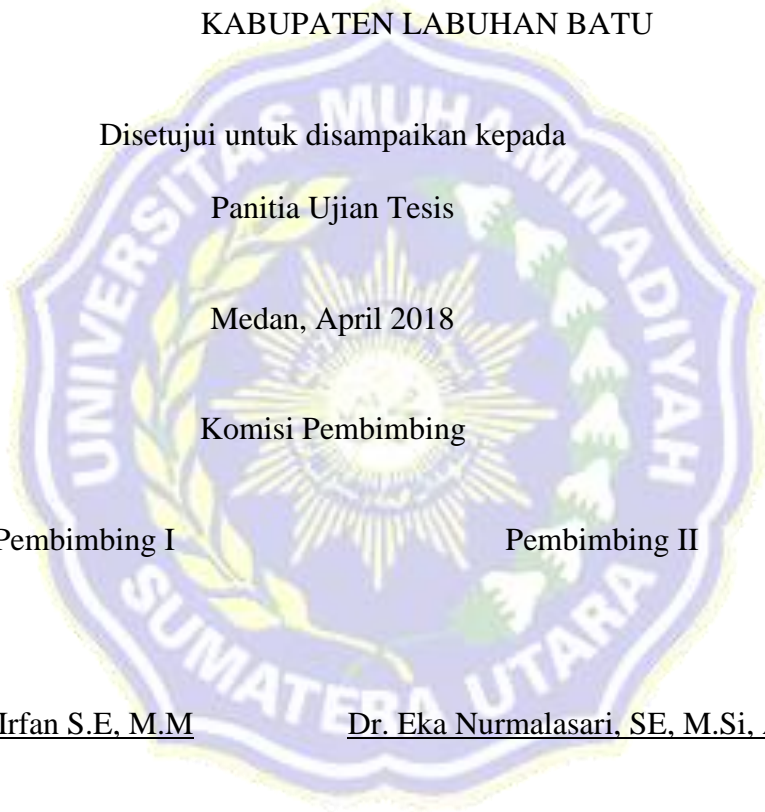
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Irfan S.E, M.M

Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, Ak, CA



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan.

Nurmala Hasibuan
NPM : 1620050026

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT DI KABUPATEN
LABUHAN BATU**

ABSTRAK

**NURMALA HASIBUAN
1620050026**

Dalam pengelolaan dana pendidikan, prinsip yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah PKBM UMI, PKBM Pena, PKBM Anak Bilah, PKBM Kenanga, PKBM Mutiara Publik, PKBM Mutiara, PKBM Al Amin, PKBM Wira Utama, PKBM Anak Bangsa, PKBM Ikhlas Cici dan PKBM Citra Karya sebanyak 144 orang dan sampel diperoleh sebanyak 59 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Hibah, Transparansi, Akuntabilitas

***THE INFLUENCE OF THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
TOWARDS THE MANAGEMENT OF THE FUND GRANTS ON
ACTIVITY CENTER LEARNING SOCIETY IN
LABUHAN BATU***

ABSTRACT

**NURMALA HASIBUAN
1620050026**

In the management of education funds, it should be noted that the principle is transparency and accountability. The purpose of this research was to test and analyze the effect of transparency and accountability towards the management of the Fund grants in Labuhan Batu Regency PKBM.

This research uses the associative approach is quantitative. The population in this research is PKBM UMI, PKBM Pena, PKBM Anak Bilah, PKBM Kenanga, PKBM Mutiara Publik, PKBM Mutiara, PKBM Al Amin, PKBM Wira Utama, PKBM Anak Bangsa, PKBM Ikhlas Cici, and PKBM Citra Karya as many as 144 people and samples obtained as many as 59 respondents. Data collection techniques using question form/questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis..

The results showed that the transparency effect on the management of grants, accountability to management of grants, transparency and accountability to the management of grants.

Keywords: Grant Funds Management, Transparency, Accountability

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak dapat terhitung penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul: **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Pada PKBM Di Kabupaten Labuhan Batu”** yang diajukan sebagai bagian dari tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penulisan tesis ini, penulis telah begitu banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak hingga akhirnya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda dan Ibunda
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor UMSU
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Widia Astuty, SE, M.Si, QIA, AK, CA, CPAI selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi.
5. Ibu Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi yang sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis.
6. Bapak Dr. Irfan, SE, MM selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis.

7. Bapak/Ibu dosen UMSU yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa khususnya penulis.
8. Pimpinan PKBM di Kabupaten Labuhan Batu yang telah memberikan izin bagi penulis melakukan penelitian.
7. Teman-teman sekalian di MAKSI UMSU angkatan X yang juga turut memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis.

Akhir kata semoga penulis dapat menyelesaikan penelitian nantinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis,

Nurmala Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Keaslian Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	9
1. Pengelolaan Dana Hibah PKBM	9
1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Hibah PKBM	9
1.2. Fungsi Pengelolaan	10
1.3. Tahap-tahap Pengelolaan	13
1.4. Dana Hibah PKBM	19
2. Transparansi	25
2.1. Pengertian Transparansi	25
2.2. Dimensi dan Indikator Transparansi	28
2.3. Prinsip-prinsip Transparansi	29
3. Konsep Akuntabilitas	30
3.1. Pengertian Akuntabilitas	30
3.2. Asas-asas Akuntabilitas	31
3.3. Indikator Akuntabilitas	32
3.4. Manfaat Akuntabilitas	32
3.5. Dimensi Akuntabilitas	33
B. Penelitian Yang Relevan	34
C. Kerangka Konseptual	35
D. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	41

1. Populasi Penelitian.....	41
2. Sampel Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Definisi Operasional Variabel	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Uji Validitas.....	45
2. Uji Reliabilitas	48
G. Teknik Analisa Data	49
1. Statistik Deskriptif	49
2. Analisis Regresi Linier Berganda	50
3. Uji Hipotesis	54
4. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
1. Statistik Deskriptif	58
2. Hasil Analisa Data	71
B. Pembahasan	78
1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Hibah	78
2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah	82
3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian	40
Tabel 3.2 Populasi PKBM	41
Tabel 3.3 Proporsi Sampel Penelitian.....	42
Tabel 3.4 Definisi Operasional	43
Tabel 3.5 Uji Validitas Pengelolaan Dana Hibah	46
Tabel 3.6 Uji Validitas Transparansi	47
Tabel 3.7 Uji Validitas Akuntabilitas	48
Tabel 3.8 Reliabilitas Data.....	50
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden	58
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	59
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden	59
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Pengelolaan Dana Hibah.....	60
Tabel 4.5 Deskriptif Pengelolaan Dana Hibah	63
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Transparansi.....	64
Tabel 4.7 Deskriptif Data Transparansi	67
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas	67
Tabel 4.9 Deskriptif Data Akuntabilitas	70
Tabel 4.10 Uji Normalitas.....	71
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas	72

Tabel 4.12	Uji Heteroskedastisitas	73
Tabel 4.13	Uji Regresi Linier Berganda	74
Tabel 4.14	Uji F	76
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 pada Pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Selain itu pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan dan memafaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya dalam membiayai aktivitas organisasi yang dilakukan (Waluyo, 2007), sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan yang efektif dan efisien akan semakin mencapai suatu keberhasilan (Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan. Pertama prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Kedua prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik

yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, *prinsip value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif (Mardiasmo, 2002).

Menurut Andrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahardjo Adisasmita, 2011).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai basis pendidikan masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, beraneka ragam dan terbuka bagi semua kelompok usia, sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam PKBM tidak hanya sekedar sebagai sasaran, akan tetapi sebagai sumber belajar. Agar PKBM tetap eksis sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya dibutuhkan pengelolaan yang baik (Mustofa Kamil, 2009). Pengelolaan keuangan PKBM

disesuaikan dengan ketentuan dan aturan keuangan yang berlaku (Kemendikbud, 2012)

Adanya dana yang bersumber dari pemerintah, lembaga dan swadaya masyarakat merupakan bentuk nyata bahwa PKBM merupakan lembaga masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang dimotori oleh masyarakat, dikelola orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola sumber-sumber yang dibutuhkan (Mustofa Kamil, 2009).

Carter Jerry B. (2007) mengemukakan bahwa untuk mengetahui pengelolaan sumber keuangan sekolah telah diberikan standar kualitas dan akuntabilitas. Pengelolaan yang baik dari suatu lembaga harus memenuhi standar kualitas dan akuntabilitas yang ditentukan. Namun demikian Indra Bastian (2007) mengemukakan bahwa masalah utama pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah rendahnya akuntabilitas publik, baik di level pusat dan daerah. Selama ini, sekolah-sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Diharapkan sekolah memiliki laporan pertanggungjawaban sekolah mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap siswa dalam setiap semester, bulan dan tahunnya.

Holzner (2006) menyatakan bahwa *“transparency is a value likely to change the relation between citizens and authorities, between professionals and their clients or patients, and between corporation and theirs workers, customers,*

investors, and communities” (Dapat diartikan bahwa transparansi adalah nilai yang dapat mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah, antara profesional dan pelanggan mereka, dan juga antara perusahaan dengan pelanggan, investor, dan masyarakatnya). Demikian pula Sri Minarti (2011) menyatakan bahwa, transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggung-jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh dalam pengelolaan dana hibah. Namun demikian belum terlihat di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yang telah memperoleh dana hibah dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas PKBM dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program pendidikan non formal. Dana hibah tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, namun dalam pengelolaan dana hibah tersebut belum menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk memperoleh dana hibah dari Pemerintah, PKBM di Labuhan Batu mengajukan proposal kepada pemberi hibah berdasarkan kebutuhan operasional PKBM dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan non formal. Pengajuan proposal tersebut disusun oleh pengelola PKBM dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa PKBM penerima dana hibah yang ada di Kabupaten Labuhan Batu untuk 2017 diantaranya adalah PKBM UMI sebesar Rp. 106.650.000, PKBM Anak Bilah

sebesar Rp. 111.820.000 dan PKBM Pena sebesar Rp. 112.580.000. Ketiga PKBM yang menerima dana hibah tersebut dimana penggunaannya dana hibah diantaranya untuk membiayai kegiatan operasional PKBM seperti membayar honor tutor serta biaya administrasi lainnya. Setiap penggunaan dana hibah dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Hasil penelusuran awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dana yang diperoleh tersebut lebih dominan diperuntukan pada biaya administrasi dan pembiayaan untuk honor tutor yang ada di PKBM yang seharusnya PKBM dapat mengelola dana hibah tersebut untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu diketahui beberapa PKBM belum memiliki media atau papan informasi mengenai penggunaan dana hibah kepada masyarakat, serta laporan keuangan hanya diberikan kepada pihak pemberi yang seharusnya penggunaan dana hibah tersebut dapat diketahui atau diakses masyarakat seperti media massa ataupun melalui situs internet. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM di Kabupaten Labuhan Batu terkesan menutupi penggunaan dana hibah yang diperoleh dari pemerintah.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut yang didalamnya diuraikan tentang transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana hibah di PKBM, maka peneliti tertarik mengangkat hal tersebut ke dalam penelitian dengan topik “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Pengelolaan dana hibah yang diterima kurang tepat sasaran dan hanya digunakan untuk biaya operasional dan tidak digunakan untuk pelatihan bagi tutor ataupun perbaikan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana.
2. Kurangnya informasi tentang penggunaan dana hibah dimana pengelolaan dana hibah hanya diketahui oleh penerima dan pemberi dana hibah namun tidak diketahui oleh masyarakat umum.
3. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak diketahui oleh masyarakat luas .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak PKBM untuk mengelola dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan dana hibah.
2. Bagi peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman dan tambahan wawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah serta bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Keaslian Penelitian

Menurut sepengetahuan peneliti, topik tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM belum pernah dilakukan penelitian sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang pertama sekali dilakukan yang disesuaikan dengan fenomena di tempat penelitian dimana pengelolaan dana hibah kurang tepat sasaran untuk pengembangan kualitas

PKBM di Kabupaten Labuhan Batu sehingga penggunaan dana hibah tersebut tidak transparan dan akuntabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Konsep Pengelolaan Dana Hibah PKBM

1.1. Pengertian Pengelolaan Dana Hibah PKBM

Balderton dalam Rahardjo Adisasmita (2011, hal.21) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Rahardjo Adisasmita (2011, hal.22) sendiri mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Harsoyo (1977) dalam Zulfikar Putra (2011) mengartikan pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

G.R. Terry dalam H. Malayu (2006, hal.2) pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (T. Hani Handoko, 1997, hal.8).

Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996, hal.1-2).

1.2. Fungsi Pengelolaan

Terry dalam Sobri, dkk (2009, hal.1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. George R. Terry (2006, hal.342) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan di atas menurut Laksmi dkk. (2008, hal. 30) adalah :

1. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
2. Memusatkan perhatian kepada sasaran
3. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
4. Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian di atas menurut Laksmi dkk. (2008, hal. 43) adalah :

1. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
2. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
3. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.

4. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
5. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006, hal. 364) adalah :

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan pengawasan menurut Sukarno (1982, hal. 165) adalah:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja.
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien.
5. Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.

1.3. Tahap-tahap Pengelolaan

Tahap pengelolaan dikemukakan dari berbagai pendapat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Handoko dalam Rahardjo Adisasmita (2011, hal.22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah :

- a. Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi.
- b. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Afifiddin (2010, hal.3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan adalah :

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai

- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan *review* secara berkala
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan yaitu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Jadi pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan.

3. Pengawasan

Menurut Handoko bahwa pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Sujamto mengemukakan mengenai pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan

Di sisi lain, UNESCO (1998) dalam Mustafa Kamil (2009, hal.85) menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

PKBM sebagai akronim dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, mempunyai makna yang strategis. Berbagai simbolis makna dari akronim PKBM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pusat, berarti bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan program-program, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai program dan keberlanjutan keberadaan PKBM itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kemudahan untuk dikenali dan diakses oleh seluruh anggota masyarakat untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak baik yang berada di wilayah keberadaan PKBM tersebut, maupun dengan berbagai pihak di luar wilayah tersebut misalnya pemerintah, lembaga nasional maupun internasional, dan sebagainya.
2. Kegiatan, berarti bahwa di PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat, serta PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan

yang positif bagi masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan inilah yang merupakan inti dari keberadaan PKBM, yang tentunya juga sangat tergantung pada konteks kebutuhan dan situasi kondisi masyarakat setempat.

3. Belajar, berarti bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM harus merupakan kegiatan yang mampu memberikan dan menciptakan proses transformasi peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif. Belajar dapat dilakukan oleh setiap orang selama sepanjang hayat disetiap kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Belajar dapat dilakukan dalam kehidupan berkesenian, beragama, berolahraga, adat istiadat dan budaya, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dengan demikian, PKBM merupakan suatu institusi terdepan yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat yang mengelola dan mengimplementasikan konsep belajar sepanjang hayat.
4. Masyarakat, berarti bahwa PKBM adalah usaha bersama masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri (*self help*) secara bersama-sama sesuai dengan ukuran nilai dan norma masyarakat itu sendiri akan makna kehidupan. Dengan demikian, ciri-ciri suatu masyarakat akan sangat kental mewarnai suatu PKBM baik mewarnai tujuan, pilihan dan disain program, kegiatan yang diselenggarakan, budaya yang dikembangkan dalam kepemimpinan dan pengelolaan kelembagaannya, keberadaan penyelenggara maupun pengelola PKBM haruslah mencerminkan peran dan fungsi seluruh anggota masyarakat tersebut (Kemendikbud, 2012, hal.5).

Sihombing (2001) mengemukakan bahwa tujuan pelebagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam arti memberdayakan seluruh potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di desa sebagai upaya membelajarkan masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, dengan prinsip pengembangan dalam rangka mewujudkan demokrasi bidang pendidikan. Pada sisi lain tujuan PKBM adalah untuk lebih mendekatkan proses pelayanan pendidikan terutama proses pelayanan pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai tuntutan, masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan luar sekolah dapat dilakukan melalui Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM). Melalui pendidikan yang dilakukan di PKBM, masyarakat diharapkan dapat memberdayakan dirinya. Sihombing (2001) menyebutkan secara tegas fungsi PKBM adalah:

1. tempat pusanan berbagai berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat,
2. sebagai sumber informasi yang andal bagi masyarakat membutuhkan keterampilan fungsional,
3. sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat. Berdasar pada peran ideal PKBM teridentifikasi beberapa fungsi-fungsi tersebut merupakan karakteristik dasar yang harus menjadi acuan pengembangan kelembagaan PKBM sebagai wadah *learning society*.

Karakteristik tersebut masih menurut Sihombing (2001) adalah sebagai berikut:

1. Tempat masyarakat belajar (*learning society*), PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.
2. Tempat tukar belajar (*learning exchange*), PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadi pertukaran berbagai informasi (pengalaman), ilmu pengetahuan dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Sehingga setiap warga belajar sangat dimungkinkan dapat berperan sebagai sumber belajar bagi warga belajar lainnya (masyarakat lainnya).
3. Pusat pengetahuan dan informasi atau perpustakaan masyarakat, sebagai perpustakaan masyarakat PKBM harus mampu berfungsi sebagai bank informasi, artinya PKBM dapat dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan. Disamping itu pula PKBM dapat berfungsi sebagai pengembang pengetahuan dan keterampilan secara inovatif, melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan model.
4. Sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat, fungsi PKBM dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pengelola dengan sumber belajar dan warga belajar serta dengan tokoh masyarakat atau

dengan berbagai lembaga (pemerintah dan swasta/LSM, ormas), akan tetapi PKBM berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh komponen masyarakat dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan, masalah dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan azas dan prinsip *learning society* atau pengembangan pendidikan dan pembelajaran (*life long learning dan life long education*).

5. Pusat penelitian masyarakat (*community research centre*) terutama dalam pengembangan pendidikan nonformal. Pada bagian ini PKBM berfungsi sebagai pusat pengkajian (*studi, research*) bagi pengembangan model-model pendidikan nonformal pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam hal ini PKBM dapat dijadikan tempat oleh masyarakat, kalangan akademisi, dll sebagai tempat menggali, mengkaji, menelaah (menganalisa) berbagai persoalan atau permasalahan dalam bidang pendidikan dan keterampilan masyarakat, terutama program yang berkaitan dengan program-program yang selaras dengan azas dan tujuan PKBM.

1.4. Dana Hibah PKBM

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (bangka.tribunnews.com, 2014). Sementara itu pendapat lain menyatakan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain

yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga (id.wikipedia.org, 2017).

Hibah adalah pemberian (*schenking*) yaitu perjanjian (obligator) dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak (R. Subekti, 1995, hal.95). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), hibah diartikan sebagai pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Selain itu pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah ini harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah

Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2. Pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan daerah

Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

5. Organisasi kemasyarakatan

Hibah kepada organisasi diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. Memiliki kepengurusan yang jelas.
2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Memiliki sekretariat tetap.

Pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah adalah:

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
2. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD maka

penerima hibah juga harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, meliputi :

- a) laporan penggunaan hibah, disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

Penggunaan/peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan/proposal/ permohonan hibah;

- c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam prakteknya, terutama untuk kegiatan kepanitiaan yang bersifat sementara atau *ad-hoc*, jika ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening kas daerah. Ketentuan tambahan seperti ini dapat mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan perlu ditetapkan ke dalam peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah.

Dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan (PP No 48 Tahun 2008 pasal 59) antara lain:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi.

2. Prinsip efisiensi

Prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

3. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

- a) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian.
- b) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

4. Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dana hibah yang diberikan kepada PKBM menurut Kemendikbud (2013) adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi sebagian kebutuhan sarana PKBM yang sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan.
2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran masyarakat di PKBM.
3. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan masyarakat yang terkait
4. Memberikan stimulan kepada PKBM untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka akreditasi nasional satuan pendidikan non formal.
5. Meningkatkan persentase PKBM penyelenggara layanan pendidikan masyarakat yang memiliki NILEM.

2. Transparansi

2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009, hal.104) adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi adalah prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh

masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Ratminto dan Winarsih, 2009, hal. 181)

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Ardianto, 2007, hal.20). Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010, hal.30).

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian oleh masyarakat.

2. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.

3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin

dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

4. Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

6. Petugas yang berwenang atau bertanggung jawab

Petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan:

- a) Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani.
- b) Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima pelayanan, dan dapat mengubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman.
- c) Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik dan pandangan mata
- d) Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan.
- e) Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.

7. Lokasi pelayanan

Tempat dan lokasi diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Janji pelayanan

Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk didalamnya mengenai standar kualitas jasa.

9. Standar pelayanan jasa standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.

10. Informasi pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta petugas yang berwenang dan bertanggung jawab (Mustopa Didjaja, 2003, hal.261).

2.2. Dimensi dan Indikator Transparansi

P. Loina Lalolo Krina (2003, hal.41) menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Selanjutnya P. Loina Lalolo Krina (2003, hal.42) mengemukakan bahwa indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap.
3. Kemudahan akses Informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Kristianten (2006, hal.73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.3. Prinsip-prinsip Transparansi

Mustopa Didjaja (2003, hal.261) menyatakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal yaitu :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dan lain-lain)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Folscher (2000) dalam Medina (2012) mengungkapkan tentang beberapa keuntungan dari adanya transparansi:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian .
2. Meningkatkan akuntabilitas.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi.

3. Akuntabilitas

3.1. Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2009, hal. 20) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta

pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Penny Kusumastuti Lukito, 2014, hal. 2).

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan Hamid (2007, hal. 136) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas diartikan sebagai kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedikitnya ada tiga pilar utama yang menjadi pilar terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a. Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat (Minarti, 2011, hal. 224).

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan (Akdon, 2009, hal. 208).

3.2. Asas-asas Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah (Sedarmayanti, 2012, hal. 70).

3.3. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Krina (2003, hal. 11) adalah sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
2. Membuat suatu keputusan yang sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar.
3. Akurasi dan kelengkapan informasi.
4. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan.
5. Kelayakan dan konsistensi.
6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.

Dadang Solihin (2007) mengemukakan bahwa indikator minimum akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

3.4. Manfaat Akuntabilitas

Waluyo (2007, hal. 197) mengemukakan bahwa upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.5 Dimensi Akuntabilitas

Syahrudin Rasul (2002, hal.11) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

B. Penelitian Yang Relevan

Pada bagian ini peneliti memberikan beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, Pahala (2014)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran	Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, transparansi juga berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, dan Akuntabilitas, dan Transparansi secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif terhadap Pengelolaan anggaran
2.	Oktana Yudha Sakti (2015)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Debi Putri Pertiwi (2015)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep <i>value for money</i> pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
4.	Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif .

C. Kerangka Konseptual

Pengelolaan keuangan dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya dalam membiayai aktivitas organisasi yang dilakukan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*)

adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya. Sementara itu akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara

transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya.

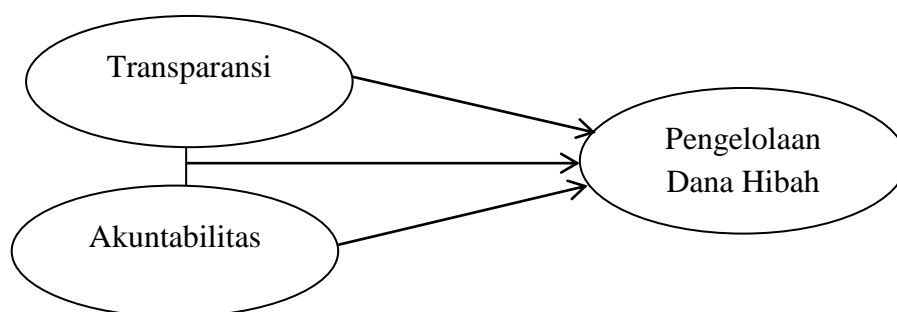
Di dalam pengelolaan dana hibah yang diperoleh dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sementara akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan Fierda Shafratunnisa (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan keuangan sekolah di SD Islam Binakheir, telah menggunakan standar operasional prosedur. SD Islam Binakheir menggunakan penyusunan anggaran pendidikan dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*).

Selain itu penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, Pahala Pahala, (2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran dimana

hasil menunjukkan akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, transparansi juga berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, dan akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif terhadap pengelolaan anggaran. Dari uraian di atas maka dapat diketahui secara ringkas bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah. Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif. Umar mengemukakan bahwa penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menggunakan teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas yang mempengaruhi pengelolaan dana hibah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu yang direncanakan pada Januari 2018 s/d Maret 2018. Rencana penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kegiatan Penelitian

Kegiatan Penelitian	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																
Bimbingan dan Seminar Proposal																
Pengumpulan & Analisis Data																
Bimbingan dan Seminar Hasil																
Sidang Tesis																

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riduwan & Akdon, 2010, hal.237). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PKBM di Kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 144 orang. Perincian PKBM di Kabupaten Labuhanbatu dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Populasi PKBM

No	Nama PKBM	Jumlah Populasi
1.	PKBM UMI	12
2.	PKBM Pena	16
3.	PKBM Anak Bilah	14
4.	PKBM Kenanga	11
5.	PKBM Mitra Publik	12
6.	PKBM Mutiara	10
7.	PKBM Al Amin	9
8.	PKBM Wira Utama	11
9.	PKBM Anak Bangsa	12
10.	PKBM Ikhlas	14
11.	PKBM Cici	12
12.	PKBM Citra Karya	11
Jumlah		144

2. Sampel Penelitian

Menurut Roscoe, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2011). Untuk menentukan jumlah sampel digunakan Rumus Slovin (Umar 2000), yaitu:

$$n = \frac{N}{N.e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian/ batas ketelitian yang diinginkan 10%.

$$n = \frac{144}{144 \cdot 0,1^2 + 1}$$

$$n = 59$$

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 59.

Alasan menggunakan rumus tersebut adalah untuk mendapat sampel yang representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada.

Sampel pada penelitian ini dibagi menggunakan *proportionate random sampling* sebagaimana pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Proporsi Sampel Penelitian

No	Nama PKBM	Jumlah Karyawan	Perhitungan	Sampel
1.	PKBM UMI	12	12 * 59 / 144	5
2.	PKBM Pena	16	16 * 59 / 144	7
3.	PKBM Anak Bilah	14	14 * 59 / 144	6
4.	PKBM Kenanga	11	11 * 59 / 144	5
5.	PKBM Mitra Publik	12	12 * 59 / 144	5
6.	PKBM Mutiara	10	10 * 59 / 144	4
7.	PKBM Al Amin	9	9 * 59 / 144	4
8.	PKBM Wira Utama	11	11 * 59 / 144	5
9.	PKBM Anak Bangsa	12	12 * 59 / 144	5
10.	PKBM Ikhlas	14	14 * 59 / 144	6
11.	PKBM Cici	12	12 * 59 / 144	5
12.	PKBM Citra Karya	11	14 * 59 / 144	5
Jumlah		144		59

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* yaitu memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada karyawan PKBM yang menjadi responden. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden, kuesioner yang diberikan diadopsi dan dimodifikasi oleh peneliti.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu transparansi (X_1), akuntabilitas (X_2) serta variabel terikat yaitu pengelolaan dana hibah (Y). Definisi operasional berdasarkan variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1.	Pengelolaan dana hibah	rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan PKBM secara efektif dan efisien dengan menggunakan dana hibah	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengawasan dan pertanggungjawaban	1 – 3 4 – 6 7 – 10	Interval

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
2.	Transparansi	kewajiban PKBM untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi pengelolaan dana hibah	a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan proses d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	1 – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12	Interval
3.	Akuntabilitas	kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan PKBM	a. Keputusan harus dibuat secara tertulis. b. Akurasi dan kelengkapan informasi. c. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. d. Penyebar-luasan informasi mengenai suatu keputusan	1 – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12	Interval

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab responden. Responden akan diminta jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat responden. Dalam penelitian ini digunakan uji coba angket atau kuesioner yang diharapkan sebagai alat ukur penelitian yang digunakan untuk mencapai kebenaran atau mendekati kebenaran, sehingga dari kuesioner ini diharapkan data utama yang berhubungan dengan masalah penelitian dapat terpecahkan.

Di dalam pengambilan data melalui angket menggunakan skala ordinal. Juliansyah Noor (2012) mengemukakan bahwa skala ordinal adalah skala ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Variabel-variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan skala Likert. Sugiyono (201, hal. 93) mengemukakan bahwa skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah : sangat setuju (SS) diberi skor 5, setuju (S) diberi skor 4, kurang setuju (KS) diberi skor 3, sangat tidak setuju (TS) diberi skor 2 dan sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1. Sebelum kuesioner dipergunakan di dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan pada PKBM Pena, PKBM Citra Karya, PKBM Cici dan PKBM Umi Kabupaten Labuhan Batu yang tidak termasuk dalam sampel penelitian masing-masing sebanyak 5 responden.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2010). Validitas alat ukur uji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari

setiap butir pertanyaan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan adalah *Product Moment Pearson* menggunakan bantuan program SPSS 17.0 dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum X \sum y)}{\sqrt{\{(N \sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(N \sum y^2) - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = korelasi *product moment pearson* item dengan soal

$\sum X$ = total nilai keseluruhan subjek per item

$\sum y$ = total nilai per subjek

N = jumlah subjek

Nilai korelasi (r) dapat dilihat dari tabel *correlation* kolom skor total baris *pearson correlation*. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of significant* = 5% dengan intepretasi data adalah jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti valid, demikian sebaliknya sehingga r_{tabel} untuk pengujian validitas dengan taraf kemaknaan $\alpha = 0,05$ dan sampel sebanyak $n = 20$ maka r_{tabel} diperoleh 0,444. Hasil uji validitas diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Dana Hibah

Uji validitas kuesioner pengelolaan dana hibah sebanyak 10 item soal dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Uji Validitas Pengelolaan Dana Hibah

Item Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,667	0,444	Valid
2	0,663	0,444	Valid
3	0,657	0,444	Valid

Item Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
4	0,666	0,444	Valid
5	0,750	0,444	Valid
6	0,756	0,444	Valid
7	0,635	0,444	Valid
8	0,115	0,444	Tidak Valid
9	0,811	0,444	Valid
10	0,765	0,444	Valid

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa kuesioner pengelolaan dana hibah yang dinyatakan valid sebanyak 9 item soal dan yang tidak valid sebanyak 1 item soal.

b. Transparansi

Uji validitas kuesioner transparansi sebanyak 12 item soal dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.6
Uji Validitas Transparansi

Item Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,553	0,444	Valid
2	0,765	0,444	Valid
3	0,750	0,444	Valid
4	0,539	0,444	Valid
5	0,777	0,444	Valid
6	0,747	0,444	Valid
7	0,341	0,444	Tidak Valid
8	0,321	0,444	Tidak Valid
9	0,878	0,444	Valid
10	0,529	0,444	Valid
11	0,785	0,444	Valid
12	0,081	0,444	Tidak Valid

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa kuesioner transparansi yang dinyatakan valid sebanyak 9 item soal dan yang tidak

valid sebanyak 3 item soal dengan hasil r_{hitung} pada setiap item soal yang valid lebih besar dari r_{tabel} .

c. Akuntabilitas

Uji validitas kuesioner akuntabilitas sebanyak 12 item soal dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7
Uji Validitas Akuntabilitas

Item Soal	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,753	0,444	Valid
2	0,886	0,444	Valid
3	0,886	0,444	Valid
4	0,746	0,444	Valid
5	0,801	0,444	Valid
6	0,871	0,444	Valid
7	0,855	0,444	Valid
8	0,772	0,444	Valid
9	0,857	0,444	Valid
10	0,748	0,444	Valid

Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa kuesioner akuntabilitas yang dinyatakan valid sebanyak 10 item soal dan yang tidak valid sebanyak 2 item soal.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Untuk menguji reliabilitas maka digunakan rumus *Alpha* sebagai berikut:

$$r_{ii} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

r_{ii} = Reliabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_t^2 = Varians total

Arikunto (2009, hal.76) mengemukakan bahwa untuk memperoleh jumlah varians butir, harus dicari terlebih dahulu varians setiap butir dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sigma_b^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

Keterangan:

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat varians tiap butir

N = Jumlah responden

Selanjutnya Suharsimi Arikunto (2009, hal.76) menyatakan bahwa untuk mencari varians total adalah sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = \frac{JK - \frac{JK^2}{N}}{N}$$

Keterangan :

JK = Jumlah kuadrat skor total

N = Jumlah responden

Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > nilai r_{tabel} . Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil:

Tabel 3.8
Reliabilitas Data

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengelolaan Dana Hibah	0,769	Reliabel
Transparansi	0,749	Reliabel
Akuntabilitas	0,770	Reliabel

Berdasarkan tabel 3.6 di atas bahwa variabel pengelolaan dana hibah dengan nilai *cronbach's alpha* = 0,769, transparansi = 0,749 dan akuntabilitas = 0,770 lebih besar dari $r_{\text{tabel}} = 0,361$ sehingga dapat dinyatakan ketiga variabel adalah reliabel.

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen penelitian, maka peneliti menaikkannya dengan skala interval pada analisis data dengan *Method of Successive Interval*. Syarifudin Hidayat (2005) mengartikan *Method of Successive Interval* adalah metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval.

H. Teknik Analisa Data

1. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Saiffudin Azwar (2003) menyatakan pemberian skor standar dilakukan dengan mengubah skor kasar kemudian bentuk penyimpangan skor *mean* (M) oleh suatu standar deviasi (S) dengan menggunakan norma sebagai berikut :

Tinggi = $(mean + 1 SD) < X$

Sedang = $(mean - 1 SD) \leq X \leq (mean + 1 SD)$

Rendah = $X < (mean - 1 SD)$

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Sugiyono (2010, hal. 149) mengemukakan bahwa analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan regresinya adalah: $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana Hibah

a = Nilai konstanta

β_1, β_2 = koefisien arah garis

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas yang diuraikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang datanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan analisa statistik dan metodi uji Kolmogorov-Smirnov melalui bantuan komputerasi program SPSS 17,0. Hasilnya adalah residual berdistribusi normal, bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Rumus yang digunakan adalah Kolmogorov Smirnov :

$$KS = \frac{X_i - \bar{X}}{SD}$$

Keterangan :

X_i = Angka pada data

Z = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal

F_T = Probabilitas komulatif normal; komulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi Z_i dihitung dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z .

F_S = Probabilitas komulatif empiris (1/data ke n)

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah:

- 1) Jika $p < 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- 2) Jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat diantara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- 1) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- 2) Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF).

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Dimana R_i^2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X_i terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat multikolinieritas (Gujarati, 2004, hal. 362).

c. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2004, hal. 406). Selain itu, dengan menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 19, heteroskedastisitas juga bisa dilihat dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Rumus yang digunakan adalah :

$$U_t = a + b x_t + V_i$$

Keterangan :

U_t = Variabel residual

V_i = Variabel kesalahan

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Sunyoto (2013) mengemukakan bahwa pengujian parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien (β_1 dan β_2) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Sementara itu Koncoro (2007) menyatakan bahwa uji statistik t pada

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada *output* hasil regresi sudah tercantum secara otomatis nilai t_{hitung} . Kita hanya memerlukan nilai t_{tabel} sesuai dengan derajat bebas dan taraf nyata. Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r_{xy}\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)}}$$

Keterangan :

t = Nilai t_{hitung}

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil r_{hitung}

Kriteria pengambilan keputusan pada uji t :

- a) H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan nilai sig. $> 0,05$.
- b) H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan nilai sig. $< 0,05$.

b. Uji F

Sunyoto (2013) menjelaskan bahwa pengujian ini melibatkan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara

F_{hitung} (F_{rasio}) dengan F_{tabel} . Menurut Koncoro (2007), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pada dasarnya nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*). Pada hasil *output* akan diketahui nilai F_{hitung} . Untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak H_0 , kita harus membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima. Ketika H_0 ditolak secara otomatis H_1 diterima. Kesimpulan dari diterimanya H_1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya (Suharyadi dan Purwanto, 2013). Rumus uji F adalah :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R = koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan uji F :

- 1) H_0 diterima apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
- 2) H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Rumus untuk menghitungnya adalah: $KD = r^2 \times 100\%$

Keterangan

KD = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil statistik deskriptif terlihat pada uraian berikut:

a) Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Dari angket yang disebarakan kepada responden diperoleh karakteristik jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1) Laki-laki	15	25,4
2) Perempuan	44	74,6
Jumlah	59	100

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang (74,6%) dan sedangkan responden berjenis laki-laki diperoleh 15 orang (25,4%).

b) Karakteristik Umur Responden

Dari angket yang disebarakan kepada responden diperoleh karakteristik umur sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
1) \leq 35 tahun	42	71,2
2) \geq 36 tahun	17	28,8
Jumlah	59	100

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui mayoritas responden berumur 20 – 35 tahun sebanyak 42 orang (71,2%) dan responden berumur \geq 36 tahun diperoleh 17 orang (28,8%).

c) Karakteristik Pendidikan Responden

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
1) SMA	26	44,1
2) S1	33	55,9
Jumlah	59	100

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 33 orang (55,9%) dan berpendidikan SMA sebanyak 26 orang (44,1%).

d) Pengelolaan Dana Hibah

Data deskriptif menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner maupun tanggapan responden. Distribusi frekuensi jawaban dari kuesioner pengelolaan dana hibah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Pengelolaan Dana Hibah

No	Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Total f
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pemilihan atau penetapan tujuan PKBM	0	0	10	16,9	18	30,5	28	47,5	3	5,1	59
2	Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan	0	0	9	15,3	18	30,5	28	47,5	4	6,8	59
3	Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pertemuan di dalam PKBM	2	3,4	4	6,8	21	35,6	22	37,3	10	16,9	59
4	Penggunaan dana hibah berdasarkan perencanaan	0	0	8	13,6	16	27,1	26	44,1	9	15,3	59
5	Penggunaan dana hibah dilakukan secara teratur dan tepat sasaran	1	1,7	6	10,2	20	33,9	28	47,5	4	6,8	59
6	Penggunaan dana hibah dilakukan oleh setiap unsur PKBM	1	1,7	5	8,5	24	40,7	24	40,7	5	8,5	59
7	PKBM memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendid-dikan yang tercan-tum pada buku kas keuangan	0	0	9	15,3	15	25,4	26	44,1	9	15,3	59
8	Dana yang diguna- kan oleh setiap unsur PKBM memang untuk kebutuhan pengembangan PKBM	2	3,4	3	5,1	18	30,5	20	33,9	16	27,1	59
9	Penggunaan dana hibah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan untuk pengembangan PKBM	0	0	8	13,6	26	44,1	22	37,3	3	5,1	59

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item soal nomor 1 yang berisikan pertanyaan “Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pemilihan atau penetapan tujuan PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 47,5% diikuti pendapat netral sebanyak 30,5%.
2. Pada item soal nomor 2 yang berisikan pertanyaan “Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 47,5% diikuti pendapat netral sebanyak 30,5%.
3. Pada item soal nomor 3 yang berisikan pertanyaan “Sebelum dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pertemuan di dalam PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 37,3% diikuti pendapat netral sebanyak 35,6%.
4. Pada item soal nomor 4 yang berisikan pertanyaan “Penggunaan dana hibah berdasarkan perencanaan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 44,1% diikuti pendapat netral sebanyak 27,1%.
5. Pada item soal nomor 5 yang berisikan pertanyaan “Penggunaan dana hibah dilakukan secara teratur dan tepat sasaran”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 47,5% diikuti pendapat netral sebanyak 33,9%.
6. Pada item soal nomor 6 yang berisikan pertanyaan “Penggunaan dana hibah dilakukan oleh setiap unsur PKBM”, mayoritas responden memberikan

pendapat tidak setuju dan netral sebanyak 40,7% diikuti pendapat netral dan sangat tidak setuju sebanyak 8,5%.

7. Pada item soal nomor 7 yang berisikan pertanyaan “PKBM memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang tercantum pada buku kas keuangan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 44,1% diikuti pendapat netral sebanyak 25,4%.
8. Pada item soal nomor 8 yang berisikan pertanyaan “Dana yang digunakan oleh setiap unsur PKBM memang untuk kebutuhan pengembangan PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 33,9% diikuti pendapat netral sebanyak 30,5%.
9. Pada item soal nomor 9 yang berisikan pertanyaan “Penggunaan dana hibah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan untuk pengembangan PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat netral sebanyak 44,1% diikuti pendapat tidak setuju sebanyak 37,3%.

Dari distribusi frekuensi jawaban responden di atas diperoleh pengelolaan dana hibah dengan nilai minimum = 17,778, nilai maksimum = 45,102, nilai *mean* = 27,942 dan nilai standar deviasi = 6,948 (lampiran 3) sehingga pengelolaan dana hibah dapat dikriteriakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Baik} &= (\text{mean} + 1 \text{ SD}) < X \\
 &= (27,942 + 6,948) < X \\
 &= 35 < X
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Cukup} &= (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \leq X \leq (\text{mean} + 1 \text{ SD}) \\
 &= (27,942 - 6,948) \leq X \leq (27,942 + 6,948) \\
 &= 21 \leq X \leq 35
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kurang} &= X < (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \\
 &= X < (27,942 - 6,948) \\
 &= X < 21
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat ditentukan kriteria pengelolaan dana hibah yaitu:

Tabel 4.5
Deskriptif Data Pengelolaan Dana Hibah

Interval	Keterangan	Jumlah	Persentase
$35 < X$	Baik	10	17,0
$21 \leq X \leq 35$	Cukup	37	62,7
$X < 21$	Kurang	12	20,3
Jumlah		59	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu mayoritas dengan kriteria cukup sebanyak 37 responden (62,7%).

e) **Transparansi**

Data deskriptif menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner maupun tanggapan responden. Data deskriptif untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Transparansi

No	Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Total f
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Penggunaan dana hibah dipublikasikan secara terbuka	1	1.7	8	13.6	16	27.1	31	52.5	3	5.1	59
2	Masyarakat dapat mengakses penggunaan dana hibah PKBM	1	1.7	10	16.9	14	23.7	30	50.8	4	6.8	59
3	Penyebarluasan laporan penggunaan dana hibah telah disampaikan melalui media massa, maupun media komunikasi personal	3	5.1	4	6.8	18	30.5	24	40.7	10	16.9	59
4	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan dana hibah	1	1.7	9	15.3	13	22.0	30	50.8	6	10.2	59
5	Penggunaan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis	1	1.7	7	11.9	17	28.8	31	52.5	3	5.1	59
6	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur	0	0	7	11.9	21	35.6	24	40.7	7	11.9	59
7	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa	2	3.4	6	10.2	12	20.3	31	52.5	8	13.6	59
8	Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan	1	1.7	6	10.2	15	25.4	21	35.6	16	27.1	59
9	penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya berdasarkan peraturan	0	0	8	13.6	24	40.7	24	40.7	3	5.1	59

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item soal nomor 1 yang berisikan pertanyaan “Penggunaan dana hibah dipublikasikan secara terbuka”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 52,5% diikuti pendapat netral sebanyak 27,1%.

2. Pada item soal nomor 2 yang berisikan pertanyaan “Masyarakat dapat mengakses penggunaan dana hibah PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 50,8% diikuti pendapat netral sebanyak 23,7%.
3. Pada item soal nomor 3 yang berisikan pertanyaan “Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan dana hibah”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 50,8% diikuti pendapat netral sebanyak 30,5%.
4. Pada item soal nomor 4 yang berisikan pertanyaan “Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan dana hibah”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 40,7% diikuti pendapat netral sebanyak 22%.
5. Pada item soal nomor 5 yang berisikan pertanyaan “Penyebarluasan laporan penggunaan dana hibah telah disampaikan melalui media massa, maupun media komunikasi personal”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 52,5% diikuti pendapat netral sebanyak 28,8%.
6. Pada item soal nomor 6 yang berisikan pertanyaan “Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 40,7% diikuti pendapat netral sebanyak 35,6%.
7. Pada item soal nomor 7 yang berisikan pertanyaan “Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 52,5% diikuti pendapat netral sebanyak 20,3%.

8. Pada item soal nomor 8 yang berisikan pertanyaan “Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 35,6% diikuti pendapat sangat tidak setuju sebanyak 27,1%.
9. Pada item soal nomor 9 yang berisikan pertanyaan “penyediaan informasi tentang
10. tanggung jawab penggunaan biaya-biaya berdasarkan peraturan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju dan netral sebanyak 40,7% diikuti pendapat setuju sebanyak 13,6%.

Dari distribusi frekuensi jawaban responden di atas diperoleh transparansi dengan nilai minimum = 14,158, nilai maksimum = 42,430, nilai *mean* = 24,959 dan nilai standar deviasi = 6,666 (lampiran 3) sehingga transparansi dapat dikriteriakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Baik} &= (\text{mean} + 1 \text{ SD}) < X \\ &= (24,959 + 6,666) < X \\ &= 32 < X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cukup} &= (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \leq X \leq (\text{mean} + 1 \text{ SD}) \\ &= (24,959 - 6,666) \leq X \leq (24,959 + 6,666) \\ &= 18 \leq X \leq 32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang} &= X < (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \\ &= X < (24,959 - 6,666) \\ &= X < 18 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat ditentukan kriteria transparansi yaitu:

Tabel 4.7
Deskriptif Data Transparansi

Interval	Keterangan	Jumlah	Persentase
$32 < X$	Baik	5	8,5
$18 \leq X \leq 32$	Cukup	35	59,3
$X < 18$	Kurang	19	32,2
Jumlah		59	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa transparansi pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu mayoritas dengan kriteria cukup sebanyak 35 responden (59,3%).

f) Akuntabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diketahui 10 item soal yang digunakan dalam penelitian dengan hasil jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas

No	Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Total f
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan perencanaan	1	1.7	8	13.6	19	32.2	28	47.5	3	5.1	59
2	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program	0	0	7	11.9	22	37.3	26	44.1	4	6.8	59
3	Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis	0	0	8	13.6	17	28.8	27	45.8	7	11.9	59
4	sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas	1	1.7	5	8.5	17	28.8	33	55.9	3	5.1	59
5	kebijakan sebuah program PKBM yang telah diambil sudah tepat sasaran	0	0	9	15.3	21	35.6	23	39.0	6	10.2	59

No	Pertanyaan	SS		S		N		TS		STS		Total f
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
6	produk-produk kebijakan yang dibuat oleh PKBM sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah	1	1.7	5	8.5	15	25.4	31	52.5	7	11.9	59
7	laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa	0	0	9	15.3	16	27.1	25	42.4	9	15.3	59
8	PKBM memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>)	3	5.1	4	6.8	18	30.5	18	30.5	16	27.1	59
9	pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PKBM sudah sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang dibuat	0	0	7	11.9	28	47.5	21	35.6	3	5.1	59
10	PKBM melakukan monitoring independen mengenai pengelolaan yang sudah berjalan	0	0	9	15.3	16	27.1	30	50.8	4	6.8	59

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada item soal nomor 1 yang berisikan pertanyaan “Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan perencanaan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 47,5% diikuti pendapat netral sebanyak 32,2%.
2. Pada item soal nomor 2 yang berisikan pertanyaan “Melakukan pengecekan terhadap jalannya program” mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 44,1% diikuti pendapat netral sebanyak 37,3%.
3. Pada item soal nomor 3 yang berisikan pertanyaan “Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis”, mayoritas memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 45,8%.

4. Pada item soal nomor 4 yang berisikan pertanyaan “sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas”, mayoritas responden memberikan tidak setuju sebanyak 55,9%.
5. Pada item soal nomor 5 yang berisikan pertanyaan “kebijakan sebuah program PKBM yang telah diambil sudah tepat sasaran”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 39%.
6. Pada item soal nomor 6 yang berisikan pertanyaan “produk-produk kebijakan yang dibuat oleh PKBM sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah”, memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 52,5%.
7. Pada item soal nomor 7 yang berisikan pertanyaan “laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 42,4%.
8. Pada item soal nomor 8 yang berisikan pertanyaan “PKBM memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait (*stakeholders*)” mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju dan netral sebanyak 30,5%.
9. Pada item soal nomor 9 yang berisikan pertanyaan “pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PKBM sudah sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang dibuat”, mayoritas responden memberikan pendapat netral sebanyak 47,5%.
10. Pada item soal nomor 10 yang berisikan pertanyaan “PKBM melakukan monitoring independen mengenai pengelolaan yang sudah berjalan”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 50,8%.

Dari distribusi frekuensi jawaban responden di atas diperoleh akuntabilitas dengan nilai minimum = 18,905, nilai maksimum = 45,045, nilai *mean* = 27,891 dan

nilai standar deviasi = 6,349 (lampiran 3) sehingga akuntabilitas dapat dikriteriakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Baik} &= (\text{mean} + 1 \text{ SD}) < X \\ &= (27,891 + 6,349) < X \\ &= 34 < X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cukup} &= (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \leq X \leq (\text{mean} + 1 \text{ SD}) \\ &= (27,891 - 6,349) \leq X \leq (27,891 + 6,349) \\ &= 22 \leq X \leq 34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang} &= X < (\text{mean} - 1 \text{ SD}) \\ &= X < (27,891 - 6,349) \\ &= X < 22 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu:

Tabel 4.9
Deskriptif Data Akuntabilitas

Interval	Keterangan	Jumlah	Persentase
$34 < X$	Baik	9	15,3
$22 \leq X \leq 34$	Cukup	41	69,4
$X < 22$	Kurang	9	15,3
Jumlah		59	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa akuntabilitas pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu mayoritas dengan kriteria cukup sebanyak 41 responden (69,4%).

2. Hasil Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dimulai dari uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji determinasi yang diuraikan sebagai berikut:

a) Uji Asumsi Klasik

Untuk memenuhi persyaratan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model yang datanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah jika $p > 0,05$ maka distribusi data normal Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pengelolaan Dana Hibah	Transparansi	Akuntabilitas
N		59	59	59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.63	22.07	24.53
	Std. Deviation	7.173	6.483	5.826
Most Extreme Differences	Absolute	.123	.157	.163
	Positive	.123	.157	.163
	Negative	-.090	-.121	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.947	1.202	1.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.331	.111	.087

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tabel 4. di atas diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada variabel pengelolaan dana hibah = 0,331, variabel transparansi = 0,111 dan variabel akuntabilitas = 0,087 lebih besar dari nilai $p = 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel dengan data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.408	2.449
	Akuntabilitas	.408	2.449

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas diperoleh nilai VIF tidak lebih dari 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Hasil uji heteroskedastisitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.842	1.496		1.899	.063
	Transparansi	.140	.084	.340	1.668	.101
	Akuntabilitas	-.091	.091	-.202	-.993	.325

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui nilai sig. > 0,05 yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara lain untuk melihatnya adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak membentuk pola tertentu yang teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas terlihat pada gambar berikut:

b) Uji Regresi

Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen

dinaikan/diturunkan. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Hasil uji regresi terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.790	2.754		1.739	.088
	Transparansi	.348	.138	.334	2.513	.015
	Akuntabilitas	.519	.145	.474	3.567	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta = 4,790, nilai koefisien regresi transparansi (β_1) = 0,348 dan nilai koefisien regresi akuntabilitas (β_2) = 0,519 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda : $Y = 4,790 + 0,348 X_1 + 0,519 X_2$ yang diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Jika koefisien regresi transparansi dan koefisien regresi akuntabilitas konstanta, maka pengelolaan dana hibah sebesar 4,790.
- 2) Nilai koefisien regresi (β_1) variabel transparansi sebesar 0,348 yang memberikan arti bahwa pengelolaan dana hibah dapat meningkat sebesar 0,348 jika transparansi meningkat satu satuan.

- 3) Nilai koefisien regresi (β_1) variabel akuntabilitas sebesar 0,519 yang memberikan arti bahwa pengelolaan dana hibah dapat meningkat sebesar 0,519 jika akuntabilitas meningkat satu satuan.

c) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara yaitu uji t dan uji F. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13 di atas yang diuraikan sebagai berikut:

1) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada *output* hasil regresi sudah tercantum secara otomatis nilai t_{hitung} . Suatu variabel akan berpengaruh nyata apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui variabel transparansi (X_1) dengan nilai $t_{hitung} = 2,513$ pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 59 - 2 = 57$, (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel) diperoleh $t_{tabel} = 1,672$ dimana $t_{hitung} = 2,513$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,672$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui variabel akuntabilitas (X_2) dengan nilai $t_{hitung} = 3,567$ pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 59 - 2 = 57$, (n adalah jumlah

responden dan k adalah jumlah variabel) diperoleh $t_{\text{tabel}} = 2,002$ dimana $t_{\text{hitung}} = 3,567$ lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 2,002$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah.

2) Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian secara simultan menggunakan distribusi F yaitu membandingkan antara F_{hitung} (F_{rasio}) dengan F_{tabel} . Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1610.087	2	805.043	37.881	.000 ^a
	Residual	1190.106	56	21.252		
	Total	2800.193	58			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

Dari tabel 4.14 diketahui nilai $F_{\text{hitung}} = 37,881$ pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = n - k - 1 = 59 - 3 - 1 = 57$, (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel) diperoleh $F_{\text{tabel}} = 3,16$ dimana $F_{\text{hitung}} = 37,881$ lebih besar dari $F_{\text{tabel}} =$

3,16 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah.

d) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.560	4.609978

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

Dari tabel 4.15 di atas diketahui nilai $R = 0,758$ sehingga koefisien determinasi diperoleh $KD = r^2 \times 100\% = (0,758)^2 \times 100\% = 57,5\%$ yang menunjukkan pengelolaan dana hibah dapat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 57,5% dan sisanya 42,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Hibah

Dari hasil uji statistik diketahui nilai $t_{hitung} = 2,513 > t_{tabel} = 2,002$ yang menunjukkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah. Selanjutnya diketahui bahwa transparansi mayoritas dengan kriteria kurang sebanyak 33 (55,9%) sedangkan kriteria cukup diperoleh 22 responden (37,3%) dan kriteria baik hanya diperoleh 4 responden (6,8%). Hasil ini menunjukkan bahwa PKBM sebagai pengelola dana hibah yang ada di Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya melakukan keterbukaan dalam penggunaan dana hibah yang diperoleh dari pemerintah. Prinsip transparansi dalam hal kejelasan dan kelengkapan informasi serta keterbukaan proses dalam pengelolaan dana hibah belum sepenuhnya dilakukan PKBM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu.

Melalui angket transparansi yang disebarakan kepada pegawai PKBM di Kabupaten Labuhan Batu diketahui pada transparansi dengan indikator keterbukaan proses mayoritas menyatakan 13,6% setuju bahwa penggunaan dana hibah dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana hibah di PKBM dipakai sesuai dengan peruntukannya. Masyarakat akan tahu penggunaan dana hibah tersebut apabila PKBM yang sebagai pengelola bertanggungjawab atas setiap dana hibah yang dipakai dipublikasikan kepada masyarakat dan sekaligus masyarakat dapat memberikan pengawasan agar dana hibah yang diperoleh tidak dipergunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi PKBM. Hasil ini sesuai dengan pendapat Ardianto (2007) yang mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara

sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner transparansi dengan indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi juga diketahui 11,9% memberikan pendapat setuju tentang penggunaan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis. Namun disisi lain diketahui 52,5% responden memberikan pendapat tidak setuju bahwa penggunaan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini menggambarkan PKBM di Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya menggunakan dana hibah yang diperoleh tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penerimaan dana hibah diperuntukkan untuk pengembangan kualitas peserta didik dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

Selanjutnya melalui angket transparansi yang disebarakan kepada pegawai PKBM di Kabupaten Labuhan Batu diketahui 16,9% responden memberikan pendapat setuju bahwa masyarakat dapat mengakses penggunaan dana hibah. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM sebagai pengelola mempunyai akses informasi kepada masyarakat dalam hal penggunaan dana hibah. Melalui akses informasi yang dimiliki tersebut, maka masyarakat dapat memantau setiap penggunaan dana hibah yang dipakai. Akses informasi yang dimaksud dapat berupa laporan penggunaan dana hibah secara tertulis yang dapat diakses melalui papan informasi PKBM.

Kemudian dari angket transparansi yang disebarakan kepada pegawai PKBM di Kabupaten Labuhan Batu diketahui 6,8% responden memberikan pendapat setuju dan 5,1% memberikan pendapat sangat setuju bahwa penyebarluasan laporan

penggunaan dana hibah telah disampaikan melalui media massa maupun media komunikasi personal PKBM. Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah pada PKBM diantaranya adalah penyebarluasan penggunaan atau laporan keuangan dana hibah melalui media massa ataupun melalui informasi PKBM itu sendiri. Hasil ini sesuai dengan pendapat Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009) yang menyatakan bahwa transparansi tersebut adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Penyampaian informasi yang dimaksud dapat diartikan PKBM dapat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah ke media massa sebagai pertanggungjawaban pengelola.

Selanjutnya dari data yang diperoleh melalui kuesioner transparansi diketahui pada item soal yang berisikan pertanyaan “Masyarakat dapat mengakses penggunaan dana hibah PKBM”, mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju sebanyak 50,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu belum mengetahui sejauhmana PKBM di dalam pengelolaan dana hibah yang diperoleh tersebut. Di dalam pengelolaan dana hibah yang diterima, pengelola seharusnya menerapkan transparansi agar setiap penggunaan dana hibah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini penting agar setiap dana yang dipakai tersebut dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya masyarakat yang belajar di PKBM tersebut.

Adanya pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan dana hibah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 yang menyatakan bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan

diantaranya adalah prinsip transparansi. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan. Ardianto (2007) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Dari hasil penelitian dan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa transparansi dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan dana hibah di PKBM. Transparansi dibutuhkan agar setiap dana benar-benar dipakai sesuai dengan peruntukannya. Transparansi dalam pengelolaan dana hibah dapat memperkecil ruang bagi penyelenggara PKBM untuk melakukan penyimpangan. Dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah, maka semua pihak baik masyarakat ataupun pemerintah dapat mengetahui dana yang dipakai tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dalam pengelolaan dana hibah dapat ditunjukkan dengan mempublikasikan laporan keuangan penggunaan dana hibah tersebut ke masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana hibah tersebut.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah

Dari hasil uji statistik diketahui nilai $t_{hitung} = 3,567 > t_{tabel} = 2,002$ yang menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah. Selanjutnya diketahui bahwa mayoritas akuntabilitas dengan kriteria cukup sebanyak 32 (54,2%) sedangkan kriteria kurang diperoleh 24 responden (40,7%) dan kriteria baik hanya diperoleh 3 responden (5,1%).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui 13,6% responden menyatakan setuju bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan perencanaan. Hal ini menggambarkan bahwa PKBM sebagai pengelola mempunyai tanggungjawab kepada pihak pemberi dana hibah dan juga kepada masyarakat dalam penggunaan dana hibah. Pengelolaan dana hibah yang baik adalah pengelola yang bertanggungjawab atas semua dana yang dipakai dari pemberi dana serta masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh diketahui 11,9% responden menyatakan setuju bahwa pengelola melakukan pengecekan terhadap jalannya program. Hal ini menggambarkan bahwa pengelola sebagai penerima dana hibah mempunyai tanggungjawab untuk selalu melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan terhadap semua dana yang diperoleh agar sesuai dengan peruntukannya. Dana hibah yang dikelola digunakan haruslah didasarkan pada pengembangan PKBM itu sendiri bukan hanya untuk membayar operasional PKBM seperti hanya membayar gaji tutor ataupun pegawai akan tetapi dipergunakan untuk membuat program pelatihan bagi peserta didik di PKBM ataupun mengembangkan kemampuan tutor itu sendiri dengan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai dengan yang diharapkan dari pemberi dana hibah. Hal ini sesuai dengan pendapat Penny Kusumastuti Lukito (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Kemudian dari data yang diperoleh diketahui 13,6% responden menyatakan setuju bahwa proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis. Hal ini menggambarkan bahwa PKBM sebagai pengelola mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dana hibah yang diterima. Hal ini juga menggambarkan sebagaimana dikemukakan Akdon (2009) bahwa akuntabilitas diartikan sebagai kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kemudian dari data yang diperoleh juga diketahui 8,5% responden menyatakan setuju bahwa sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas. Sedarmayanti (2012) mengemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas diantaranya adalah menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan dana hibah yang diterima dari pemerintah tentu berdasarkan petunjuk yang diberikan agar tujuan dana yang diberikan tepat sasaran, efektif dan efisien di dalam penggunaannya.

Selanjutnya dari data yang diperoleh melalui kuesioner diketahui 15,3% responden menyatakan setuju bahwa kebijakan sebuah program PKBM yang telah diambil sudah tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2012) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas diantaranya adalah berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dana yang dipakai berdasarkan tujuan dari PKBM itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM. Setiap PKBM yang menghasilkan SDM yang baik akan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga kepada negara.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh melalui angket akuntabilitas diketahui 55,9% pegawai PKBM menyatakan tidak setuju terhadap sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas. Hasil ini menggambarkan bahwa PKBM dalam menggunakan dana hibah yang diperoleh dari pemerintah belum tepat sasaran. Dari beberapa wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penggunaan dana hibah dipakai diantaranya untuk membayar honor tentor. Seharusnya dalam penggunaan dana hibah tersebut dipakai untuk pengembangan kualitas PKBM itu sendiri seperti peningkatan sarana dan prasarana, untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan setempat.

Di sisi lain diketahui bahwa 44,1% pegawai menyatakan tidak setuju terhadap penggunaan dana hibah berdasarkan perencanaan. Hasil ini menunjukkan bahwa PKBM yang ada di Kabupaten Labuhan Batu belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah. Rendahnya akuntabilitas memberikan dampak pada pengelolaan dana hibah PKBM yang tidak jelas. Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui kuesioner menunjukkan bahwa PKBM masih dalam kategori kurang dimana mayoritas responden memberikan pendapat tidak setuju. Hal ini juga menggambarkan masih rendahnya akuntabilitas yang dimiliki PKBM sehingga perlunya peningkatan akuntabilitas melalui tanggungjawab dari pengelola PKBM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, Pahala (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, transparansi juga berhubungan positif dengan pengelolaan anggaran, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama mempunyai hubungan yang positif terhadap pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 yang menyatakan bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan diantaranya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Hibah

Dari hasil uji statistik diketahui nilai $F_{hitung} = 37,881 > F_{tabel} = 3,16$ yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 yang menyatakan bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan diantaranya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga a) Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian, b) Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku

kepentingan pendidikan, sedangkan prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melalui pendapat Ardianto (2007) dinyatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik, sementara Penny Kusumastuti Lukito (2014) menjelaskan akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Berpengaruhnya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu dapat diketahui melalui kuesioner transparansi yang diberikan responden menyatakan mayoritas tidak setuju terhadap laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa dan mayoritas tidak setuju sebanyak 52,5%. Dari pendapat tersebut membuktikan bahwa PKBM yang di Kabupaten Labuhan Batu belum menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu dibutuhkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengguna dana hibah tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari penyimpangan atau tidak tepat sasaran. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

merupakan suatu wadah dimana seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi atau bakat yang dikelola dan diselenggarakan masyarakat. PKBM sebagai wahana untuk mempersiapkan warga masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana hibah dapat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebesar 57,5% dan sisanya 42,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Menurut PP No 48 Tahun 2008 pasal 59 disebutkan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat diketahui bahwa 42,5% tersebut dipengaruhi oleh faktor keadilan dan efisiensi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan prakarsa pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, perlu dibina secara berkesinambungan menuju standar yang mapan dengan mengelola dana hibah untuk mengembangkan kemajuan PKBM itu sendiri. Manajemen PKBM perlu ditata kembali agar lebih responsif dan berdaya dalam melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan, sedangkan netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya dan lainnya untuk memperoleh layanan

pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan di PKBM harus merancang standar kebutuhan belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien dan bermutu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.
3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah pada PKBM di Kabupaten Labuhan Batu.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, saran yang dijadikan bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. PKBM

Agar penggunaan dana hibah untuk PKBM dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kualitas peserta didik di PKBM sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat yang belajar di PKBM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana hibah yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas PKBM itu sendiri serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan PKBM yang berkualitas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah dengan mengembangkan penelitian seperti menambah variabel efisiensi dan efektifitas sehingga pengetahuan tentang pengelolaan dana hibah dapat berkembang bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid (2007). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Afifiddin (2010). *Pengantar administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Agoes Cenik. Ardana (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akdon (2009). *Strategic Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Alwi Hasan (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- BASICS, 2014. *Panduan Penerapan Praktik Cerdas Pengelolaan PKBM Mandiri Dan Berkualitas*. Jakarta.
- Carter Jerry B. (2007). *Financial Management Benchmark for School Nutrition Program National Food Service Management Institute*. National Food Service Management Institute, The University of Mississippi.
- Damodar Gujarati (2003) *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain,. Jakarta: Erlangga.
- Danang Sunyoto (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Debi Putri Pertiwi (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Depdikbud (1995/1996). *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud.
- Emma Himayaturohmah (2017). Strategi Pengembangan Manajemen Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Riau. *Jurnal Penjamin Mutu*, Balai Diklat Keagamaan Bandung.
- Febri Medina (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi. Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia*. Skripsi.

- Hardi Siswoyo (2012). *Pengelolaan Pembiayaan Pusta Kegiatan Belajar Masyarakat (Sutdi Situs PKBM Bhakti Punung Pacita)*. Tesis Universitas Muhammdiyah Surakarta.
- Hery Harjono Muljo, Heny Kurniawati, Pahala Pahala, (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 5 No. 2 November 2014.
- Imam Ghozali (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery Harjono Muljo; Heny Kurniawati; Pahala (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran*. *Jurnal : BINUS BUSINESS REVIEW* Vol. 5 No. 2 November 2014: 537-550.
- Holzner (2006). *Transparency in global change: the vanguard of the open society*. USA: Pittsburgh Press.
- Kemendikbud (2012). *Standar Dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- _____ (2013). *Saran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI.
- Krina L.P.L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. UNDP.
- Kristianten (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajat, (2007). *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustofa Kamil (2009). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nico Andrianto (2007). *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.

- Oktana Yudha Sakti (2015). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek*. Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*(Vol : 8 No : 2 Tahun 2017).
- Rahardjo Adisasmita (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- R. Subekti (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Saiffudin Azwar (2003). *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-enam, Yogyakarta,. Penerbit: Pustaka Pelajar
- Sihombing, Umberto (2001). *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat, Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Sri Minarti (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syahrudin Rasul (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod
- Suharsimi Arikunto (1988). *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta : CV. Rajawali.
- _____ (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharyadi dan Purwanto (2013). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Sedarmayanti (2012). *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik*. Bagian. Kedua Edisi Revisi. Bandung : CV Mandar Maju.

Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Waluyo (2007). *Manajemen publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju.

KUESIONER

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA PKBM DI KABUPATEN LABUHAN BATU

No. Responden : _____

A. Identitas Responden

1. Nama Responden : _____
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)
3. Umur : _____ tahun
4. Pendidikan : SMA / D3 / S1 (coret yang tidak perlu)

Petunjuk Pengisian

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

B. Variabel Pengelolaan Dana Hibah

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Di dalam penerimaan dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pemilihan atau penetapan tujuan PKBM					
2.	Di dalam penerimaan dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan					
3.	Di dalam penerimaan dana hibah yang diperoleh terlebih dilakukan pertemuan di dalam PKBM					
4.	Penggunaan dana hibah berdasarkan perencanaan					

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
5.	Penggunaan dana hibah dilakukan secara teratur dan tepat sasaran					
6.	Penggunaan dana hibah dilakukan oleh setiap unsur PKBM					
7.	PKBM memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan yang tercantum pada buku kas keuangan					
8.	Dana yang digunakan oleh setiap unsur PKBM memang untuk kebutuhan pengembangan PKBM					
9.	Penggunaan dana hibah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan untuk pengembangan PKBM					

C. Variabel Transparansi

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Penggunaan dana hibah dipublikasikan secara terbuka					
2.	Masyarakat dapat mengakses penggunaan dana hibah PKBM					
3.	Penyebarluasan laporan penggunaan dana hibah telah disampaikan melalui media massa, maupun media komunikasi personal					
4.	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan dana hibah					
5.	Penggunaan dana hibah sesuai dengan petunjuk teknis					
6.	Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur					

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
7.	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa					
8.	Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan lembaga non pemerintahan					
9.	penyediaan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya-biaya berdasarkan peraturan					

D. Variabel Akuntabilitas

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan perencanaan					
2.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program					
3.	Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis					
4.	sasaran kebijakan yang telah diambil sudah jelas					
5.	kebijakan sebuah program sekolah yang telah diambil sudah tepat sasaran					
6.	produk-produk kebijakan yang dibuat oleh sekolah sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah					
7.	laporan pertanggungjawaban sekolah diinformasikan melalui media massa					
8.	PKBM memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>)					
9.	pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PKBM sudah sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang dibuat					

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
10	PKBM melakukan monitoring independen mengenai pengelolaan yang sudah berjalan					

Pengelolaan Dana Hibah	Pearson Correlation	.667**	.663**	.657**	.666**	.750**	.756**	.635**	.115	.811**	.765**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.002	.001	.000	.000	.003	.630	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Pengelolaan Dana Hibah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	10

Item Soal 12	Pearson Correlation	-.087	.166	-.004	-.050	-.098	.158	-.108	-.139	.131	.144	-.213	1	.087
	Sig. (2-tailed)	.714	.483	.986	.833	.681	.507	.651	.559	.583	.546	.367		.717
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Transparansi	Pearson Correlation	.553	.765**	.750**	.539*	.777**	.747**	.347	.321	.878**	.529	.785**	.087	1
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.014	.000	.000	.134	.167	.000	.016	.000	.717	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Transparansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.749	10

Item Soal 12	Pearson Correlation	.263	.140	.375	-.086	.301	.298	.262	.000	.145	.145	.679**	1	.343
	Sig. (2-tailed)	.262	.556	.103	.717	.197	.203	.265	1.000	.543	.543	.001		.139
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Transparansi	Pearson Correlation	.753**	.886**	.886**	.746**	.801**	.871**	.855**	.772**	.857**	.748**	.353	.343	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.127	.139	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	11

Lampiran 2

MASTER DATA

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah										Transparansi									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
1	Laki-laki	26	SMA	4	4	5	4	4	4	5	4	4	38	3	4	4	4	4	4	4	3	4	34
2	Perempuan	27	SMA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35	3	4	3	3	3	3	3	3	4	29
3	Perempuan	42	SMA	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29	3	3	3	3	3	3	2	2	4	26
4	Perempuan	31	S1	5	4	4	4	4	2	3	3	3	32	2	3	3	1	2	2	2	1	3	19
5	Perempuan	28	S1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	16	2	2	2	3	2	1	1	2	2	17
6	Perempuan	29	SMA	3	4	4	4	4	4	4	3	4	34	4	4	5	5	4	4	5	4	4	39
7	Laki-laki	43	S1	2	2	2	1	3	2	2	1	2	17	2	1	2	2	1	2	2	2	2	16
8	Perempuan	41	S1	3	3	3	3	3	3	2	2	4	26	2	2	2	3	2	2	2	2	3	20
9	Perempuan	36	S1	2	3	3	1	2	2	2	1	3	19	2	2	1	2	2	2	2	1	2	16
10	Perempuan	35	S1	2	2	2	3	2	1	1	2	2	17	2	2	2	2	2	1	2	1	2	16
11	Perempuan	29	SMA	3	3	4	3	4	3	3	3	2	28	3	4	3	4	4	3	3	4	3	31
12	Laki-laki	34	S1	2	1	2	3	2	2	3	4	3	22	3	1	3	1	2	2	2	1	2	17
13	Laki-laki	35	S1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	20	3	2	3	2	2	1	3	1	2	19
14	Perempuan	36	SMA	2	2	1	2	2	2	2	1	2	16	3	3	3	4	3	2	2	2	3	25
15	Perempuan	37	S1	3	4	3	4	4	3	4	4	2	31	5	4	4	4	3	4	3	4	4	35
16	Perempuan	29	SMA	3	2	3	1	2	3	3	1	3	21	2	2	1	2	2	2	2	2	2	17
17	Perempuan	37	S1	4	4	4	4	4	4	5	4	3	36	3	3	3	3	4	4	3	3	2	28
18	Perempuan	25	SMA	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	2	4	2	2	3	2	2	3	3	23
19	Perempuan	39	SMA	3	3	3	4	3	2	2	2	3	25	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah										Transparansi									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
20	Perempuan	38	S1	4	4	5	4	5	5	4	5	4	40	5	5	5	4	5	4	5	4	4	41
21	Perempuan	36	S1	3	4	3	4	4	4	3	4	4	33	2	2	3	3	2	3	2	3	2	22
22	Perempuan	37	SMA	3	3	3	3	4	4	3	3	2	28	2	3	3	2	2	2	1	3	2	20
23	Perempuan	30	S1	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43	4	4	4	4	3	3	4	4	2	32
24	Perempuan	31	SMA	3	4	3	3	4	4	4	3	4	32	4	3	4	3	3	3	3	3	4	30
25	Perempuan	31	S1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	16	3	3	3	2	2	3	4	2	3	25
26	Laki-laki	32	SMA	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
27	Perempuan	33	S1	2	3	3	2	2	2	1	3	2	20	3	3	2	2	1	2	4	3	4	24
28	Laki-laki	28	SMA	4	4	4	4	3	3	4	4	2	32	4	4	3	4	3	4	3	4	3	32
29	Perempuan	28	S1	4	3	4	3	3	3	3	3	4	30	3	2	3	2	3	3	2	3	3	24
30	Perempuan	44	SMA	3	3	3	2	2	3	4	2	3	25	3	2	3	2	2	2	3	2	2	21
31	Laki-laki	41	S1	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29	3	3	3	4	4	3	4	3	3	30
32	Perempuan	45	S1	3	3	2	2	1	2	4	3	4	24	4	3	2	2	3	2	2	3	2	23
33	Perempuan	48	SMA	4	4	5	5	5	5	5	4	5	42	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38
34	Laki-laki	35	S1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	24	2	2	1	2	2	2	1	2	2	16
35	Perempuan	33	SMA	3	2	1	2	2	2	1	2	2	17	2	2	1	2	2	2	2	3	2	18
36	Laki-laki	37	S1	3	3	3	4	4	3	4	3	3	30	2	2	2	2	2	2	1	2	3	18
37	Laki-laki	38	SMA	4	3	2	2	3	2	2	3	2	23	2	2	2	2	2	3	2	1	3	19
38	Perempuan	28	S1	4	4	5	4	4	4	4	5	4	38	2	2	2	3	3	2	3	2	3	22
39	Perempuan	27	SMA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	2	2	1	2	3	3	2	3	3	21
40	Perempuan	39	S1	2	2	1	2	2	2	2	3	2	18	1	1	2	2	2	3	2	1	3	17
41	Perempuan	38	SMA	2	2	2	2	2	2	1	2	3	18	2	2	1	2	2	3	2	1	3	18
42	Laki-laki	38	SMA	2	2	2	2	2	3	2	1	3	19	2	2	1	2	2	1	2	2	1	15
43	Perempuan	40	SMA	2	2	2	3	3	2	3	2	3	22	2	2	2	3	3	3	3	2	3	23

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah										Transparansi									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
44	Perempuan	47	S1	2	2	1	2	3	3	2	3	3	21	2	2	1	2	2	2	2	1	2	16
45	Laki-laki	45	S1	3	3	2	2	2	3	2	3	3	23	4	3	2	1	2	3	2	2	3	22
46	Perempuan	27	SMA	2	2	1	2	2	3	2	1	3	18	2	2	2	1	1	2	2	1	2	15
47	Perempuan	34	S1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	25	2	2	2	2	2	1	2	1	3	17
48	Perempuan	41	S1	2	2	2	3	3	3	3	2	3	23	2	2	1	2	2	1	2	2	1	15
49	Perempuan	39	SMA	2	2	1	2	2	2	2	1	2	16	1	1	2	1	2	2	1	1	2	13
50	Perempuan	36	S1	4	3	2	1	2	3	2	2	3	22	3	3	3	2	3	3	3	2	2	24
51	Laki-laki	38	SMA	3	3	3	3	3	2	2	3	3	25	2	2	2	3	2	2	1	2	2	18
52	Perempuan	27	S1	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26	2	2	2	2	2	3	2	1	3	19
53	Perempuan	35	SMA	4	3	3	2	2	3	2	3	3	25	1	2	2	2	2	3	2	1	3	18
54	Laki-laki	38	S1	3	3	2	3	2	2	3	3	2	23	2	2	3	2	3	3	1	2	2	20
55	Perempuan	37	S1	3	3	3	2	3	3	3	2	2	24	3	3	2	2	3	2	2	1	3	21
56	Laki-laki	37	S1	2	2	2	3	2	2	1	2	2	18	2	2	2	3	2	2	2	2	2	19
57	Perempuan	39	S1	2	2	2	2	2	3	2	1	3	19	2	2	2	2	2	2	2	2	3	19
58	Perempuan	40	SMA	1	2	2	2	2	3	2	1	3	18	2	3	2	2	2	1	2	2	1	17
59	Perempuan	40	S1	4	3	3	3	3	3	1	3	3	26	3	4	4	3	4	4	3	4	3	32

R	Akuntabilitas										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	4	4	5	4	4	4	5	3	4	42
2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	27
3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	31
4	2	3	1	2	2	2	3	1	3	3	22
5	2	2	3	2	1	1	1	2	2	2	18
6	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	35
7	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	18
8	3	3	3	2	2	2	2	2	4	1	24
9	2	3	2	2	2	2	2	1	3	2	21
10	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	18
11	3	3	1	2	3	3	3	3	2	3	26
12	2	1	1	2	2	2	3	4	3	4	24
13	3	3	4	2	4	3	3	2	3	4	31
14	2	2	4	3	2	2	2	1	2	2	22
15	2	2	4	3	3	3	2	2	2	3	26
16	3	2	2	2	2	2	3	1	3	3	23
17	3	1	3	4	4	3	2	1	2	2	25
18	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	33
19	3	3	1	2	2	2	2	2	3	3	23
20	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
21	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	28
22	3	3	2	2	2	1	3	3	2	2	23
23	2	4	4	3	3	4	2	3	3	2	30
24	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2	23
25	2	2	2	2	3	4	2	2	1	2	22
26	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
27	2	3	2	1	2	4	1	3	2	4	24
28	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	35
29	4	3	2	3	3	2	3	3	4	3	30
30	3	3	2	2	2	1	4	2	3	2	24
31	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	28
32	3	3	2	3	2	2	4	3	4	2	28
33	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
34	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	28
35	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	20
36	3	3	2	2	2	1	4	3	3	3	26
37	4	3	2	2	3	2	2	3	2	1	24
38	4	4	3	3	2	3	4	5	4	4	36
39	2	2	2	3	3	2	1	2	2	2	21

R	Akuntabilitas										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	22
41	2	2	2	2	3	2	1	2	3	2	21
42	2	2	2	2	1	2	2	1	3	2	19
43	2	2	3	3	3	3	3	2	3	1	25
44	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	22
45	1	1	1	2	3	2	2	1	3	2	18
46	2	2	1	1	2	2	2	1	3	2	18
47	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	18
48	2	2	2	2	1	2	3	2	3	4	23
49	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	17
50	4	3	2	3	3	3	2	2	3	2	27
51	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	19
52	2	2	2	2	3	2	2	1	3	2	21
53	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2	20
54	1	1	2	3	3	1	1	1	2	2	17
55	3	3	2	3	2	2	3	2	2	1	23
56	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	20
57	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	20
58	1	2	2	2	1	2	2	1	3	2	18
59	4	3	3	4	4	3	1	3	3	3	31

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
1	Laki-laki	20	SMA	4.619	4.619	4.579	3.911	4.250	4.705	4.605	3.677	4.595	39.561
2	Perempuan	22	SMA	4.619	4.619	3.755	3.911	4.250	3.685	3.658	3.677	4.595	36.769
3	Perempuan	23	SMA	3.614	3.614	2.969	3.008	3.396	3.685	3.658	2.770	4.595	31.307
4	Perempuan	30	S1	5.962	4.619	3.755	3.911	4.250	2.506	2.935	2.770	3.526	34.234
5	Perempuan	34	S1	2.536	2.536	2.058	1.000	2.382	2.506	1.000	1.923	2.378	18.317
6	Perempuan	21	SMA	3.614	4.619	3.755	3.911	4.250	4.705	3.658	2.770	4.595	35.876
7	Laki-laki	33	S1	2.536	2.536	2.058	1.000	3.396	2.506	2.112	1.000	2.378	19.520
8	Perempuan	29	S1	3.614	3.614	2.969	3.008	3.396	3.685	2.112	1.923	4.595	28.914
9	Perempuan	27	S1	2.536	3.614	2.969	1.000	2.382	2.506	2.112	1.000	3.526	21.644
10	Perempuan	28	S1	2.536	2.536	2.058	3.008	2.382	1.000	1.000	1.923	2.378	18.819
11	Perempuan	22	SMA	3.614	3.614	3.755	3.008	4.250	3.685	2.935	2.770	2.378	30.007
12	Laki-laki	30	S1	2.536	1.000	2.058	3.008	2.382	2.506	2.935	3.677	3.526	23.628
13	Laki-laki	33	S1	2.536	2.536	2.058	3.008	2.382	2.506	2.112	1.923	3.526	22.585
14	Perempuan	23	SMA	2.536	2.536	1.000	2.109	2.382	2.506	2.112	1.000	2.378	18.558
15	Perempuan	38	S1	3.614	4.619	2.969	3.911	4.250	3.685	3.658	3.677	2.378	32.761
16	Perempuan	23	SMA	3.614	2.536	2.969	1.000	2.382	3.685	2.935	1.000	3.526	23.646
17	Perempuan	39	S1	4.619	4.619	3.755	3.911	4.250	4.705	4.605	3.677	3.526	37.668
18	Perempuan	21	SMA	4.619	4.619	3.755	3.911	3.396	4.705	2.935	3.677	4.595	36.213
19	Perempuan	42	SMA	3.614	3.614	2.969	3.911	3.396	2.506	2.112	1.923	3.526	27.570
20	Perempuan	34	S1	4.619	4.619	4.579	3.911	5.276	5.701	3.658	4.601	4.595	41.560
21	Perempuan	44	S1	3.614	4.619	2.969	3.911	4.250	4.705	2.935	3.677	4.595	35.276

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
22	Perempuan	21	SMA	3.614	3.614	2.969	3.008	4.250	4.705	2.935	2.770	2.378	30.242
23	Perempuan	43	S1	4.619	5.962	4.579	5.052	5.276	4.705	4.605	4.601	5.701	45.102
24	Perempuan	22	SMA	3.614	4.619	2.969	3.008	4.250	4.705	3.658	2.770	4.595	34.187
25	Perempuan	40	S1	2.536	2.536	2.058	2.109	1.000	2.506	2.112	1.923	1.000	17.778
26	Laki-laki	22	SMA	2.536	3.614	2.969	3.008	3.396	3.685	2.935	2.770	3.526	28.438
27	Perempuan	39	S1	2.536	3.614	2.969	2.109	2.382	2.506	1.000	2.770	2.378	22.262
28	Laki-laki	21	SMA	4.619	4.619	3.755	3.911	3.396	3.685	3.658	3.677	2.378	33.698
29	Perempuan	34	S1	4.619	3.614	3.755	3.008	3.396	3.685	2.935	2.770	4.595	32.375
30	Perempuan	20	SMA	3.614	3.614	2.969	2.109	2.382	3.685	3.658	1.923	3.526	27.479
31	Laki-laki	38	S1	4.619	4.619	2.969	3.008	3.396	3.685	2.935	2.770	3.526	31.527
32	Perempuan	36	S1	3.614	3.614	2.058	2.109	1.000	2.506	3.658	2.770	4.595	25.922
33	Perempuan	23	SMA	4.619	4.619	4.579	5.052	5.276	5.701	4.605	3.677	5.701	43.831
34	Laki-laki	32	S1	3.614	2.536	2.969	2.109	3.396	3.685	2.112	2.770	3.526	26.716
35	Perempuan	23	SMA	3.614	2.536	1.000	2.109	2.382	2.506	1.000	1.923	2.378	19.446
36	Laki-laki	27	S1	3.614	3.614	2.969	3.911	4.250	3.685	3.658	2.770	3.526	31.996
37	Laki-laki	22	SMA	4.619	3.614	2.058	2.109	3.396	2.506	2.112	2.770	2.378	25.560
38	Perempuan	37	S1	4.619	4.619	4.579	3.911	4.250	4.705	3.658	4.601	4.595	39.538
39	Perempuan	22	SMA	3.614	4.619	3.755	3.911	4.250	4.705	3.658	3.677	4.595	36.784
40	Perempuan	39	S1	2.536	2.536	1.000	2.109	2.382	2.506	2.112	2.770	2.378	20.327
41	Perempuan	22	SMA	2.536	2.536	2.058	2.109	2.382	2.506	1.000	1.923	3.526	20.575
42	Laki-laki	23	SMA	2.536	2.536	2.058	2.109	2.382	3.685	2.112	1.000	3.526	21.943
43	Perempuan	24	SMA	2.536	2.536	2.058	3.008	3.396	2.506	2.935	1.923	3.526	24.423
44	Perempuan	39	S1	2.536	2.536	1.000	2.109	3.396	3.685	2.112	2.770	3.526	23.669
45	Laki-laki	42	S1	3.614	3.614	2.058	2.109	2.382	3.685	2.112	2.770	3.526	25.868

R	Karakteristik Responden			Pengelolaan Dana Hibah									
	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor
46	Perempuan	21	SMA	2.536	2.536	1.000	2.109	2.382	3.685	2.112	1.000	3.526	20.885
47	Perempuan	43	S1	2.536	2.536	2.969	3.008	3.396	3.685	2.935	2.770	3.526	27.361
48	Perempuan	35	S1	2.536	2.536	2.058	3.008	3.396	3.685	2.935	1.923	3.526	25.602
49	Perempuan	23	SMA	2.536	2.536	1.000	2.109	2.382	2.506	2.112	1.000	2.378	18.558
50	Perempuan	44	S1	4.619	3.614	2.058	1.000	2.382	3.685	2.112	1.923	3.526	24.917
51	Laki-laki	23	SMA	3.614	3.614	2.969	3.008	3.396	2.506	2.112	2.770	3.526	27.513
52	Perempuan	28	S1	3.614	3.614	2.969	3.008	3.396	3.685	2.112	2.770	3.526	28.693
53	Perempuan	23	SMA	4.619	3.614	2.969	2.109	2.382	3.685	2.112	2.770	3.526	27.785
54	Laki-laki	40	S1	3.614	3.614	2.058	3.008	2.382	2.506	2.935	2.770	2.378	25.262
55	Perempuan	33	S1	3.614	3.614	2.969	2.109	3.396	3.685	2.935	1.923	2.378	26.622
56	Laki-laki	34	S1	2.536	2.536	2.058	3.008	2.382	2.506	1.000	1.923	2.378	20.325
57	Perempuan	39	S1	2.536	2.536	2.058	2.109	2.382	3.685	2.112	1.000	3.526	21.943
58	Perempuan	20	SMA	1.000	2.536	2.058	2.109	2.382	3.685	2.112	1.000	3.526	20.407
59	Perempuan	29	S1	4.619	3.614	2.969	3.008	3.396	3.685	1.000	2.770	3.526	28.586

R	Transparansi										Akuntabilitas										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor
1	3.579	4.223	3.882	4.127	4.537	4.279	4.074	2.899	4.601	36.202	5.537	4.605	4.279	5.537	4.293	4.273	4.091	4.278	3.455	4.478	44.824
2	3.579	4.223	3.125	3.342	3.659	3.205	3.375	2.899	4.601	32.009	3.560	3.470	3.276	2.557	3.205	3.439	2.178	2.855	2.259	3.507	30.306
3	3.579	3.403	3.125	3.342	3.659	3.205	2.341	2.089	4.601	29.345	3.560	3.470	3.276	3.771	3.205	2.341	4.091	2.855	4.728	3.507	34.804
4	2.485	3.403	3.125	1.000	2.509	2.182	2.341	1.000	3.446	21.491	2.437	3.470	1.000	2.557	2.180	2.341	3.120	1.000	3.455	3.507	25.066
5	2.485	2.396	2.155	3.342	2.509	1.000	1.000	2.089	2.312	19.289	2.437	2.324	3.276	2.557	1.000	1.000	1.000	2.024	2.259	2.420	20.297
6	4.363	4.223	4.601	5.228	4.537	4.279	4.893	3.703	4.601	40.429	3.560	4.605	3.276	4.656	4.293	3.439	4.091	2.855	4.728	3.507	39.010
7	2.485	1.000	2.155	2.342	1.000	2.182	2.341	2.089	2.312	17.907	2.437	2.324	2.250	1.000	2.180	2.341	2.178	1.000	2.259	2.420	20.389
8	2.485	2.396	2.155	3.342	2.509	2.182	2.341	2.089	3.446	22.946	3.560	3.470	3.276	2.557	2.180	2.341	2.178	2.024	4.728	1.000	27.313
9	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	2.182	2.341	1.000	2.312	18.567	2.437	3.470	2.250	2.557	2.180	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	24.287
10	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	1.000	2.341	1.000	2.312	18.541	2.437	2.324	2.250	2.557	1.000	2.341	1.000	2.024	2.259	2.420	20.613
11	3.579	4.223	3.125	4.127	4.537	3.205	3.375	3.703	3.446	33.320	3.560	3.470	1.000	2.557	3.205	3.439	3.120	2.855	2.259	3.507	28.973
12	3.579	1.000	3.125	1.000	2.509	2.182	2.341	1.000	2.312	19.048	2.437	1.000	1.000	2.557	2.180	2.341	3.120	3.607	3.455	4.478	26.175
13	3.579	2.396	3.125	2.342	2.509	1.000	3.375	1.000	2.312	21.639	3.560	3.470	4.279	2.557	4.293	3.439	3.120	2.024	3.455	4.478	34.675
14	3.579	3.403	3.125	4.127	3.659	2.182	2.341	2.089	3.446	27.952	2.437	2.324	4.279	3.771	2.180	2.341	2.178	1.000	2.259	2.420	25.188
15	5.276	4.223	3.882	4.127	3.659	4.279	3.375	3.703	4.601	37.126	2.437	2.324	4.279	3.771	3.205	3.439	2.178	2.024	2.259	3.507	29.424
16	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	2.182	2.341	2.089	2.312	19.657	3.560	2.324	2.250	2.557	2.180	2.341	3.120	1.000	3.455	3.507	26.294
17	3.579	3.403	3.125	3.342	4.537	4.279	3.375	2.899	2.312	30.851	3.560	1.000	3.276	4.656	4.293	3.439	2.178	1.000	2.259	2.420	28.081
18	2.485	4.223	2.155	2.342	3.659	2.182	2.341	2.899	3.446	25.733	3.560	3.470	3.276	3.771	4.293	3.439	3.120	3.607	3.455	4.478	36.469
19	2.485	2.396	2.155	1.000	2.509	2.182	2.341	1.000	2.312	18.381	3.560	3.470	1.000	2.557	2.180	2.341	2.178	2.024	3.455	3.507	26.271
20	5.276	5.413	4.601	4.127	5.537	4.279	4.893	3.703	4.601	42.430	4.484	4.605	4.279	4.656	4.293	5.154	4.091	4.278	4.728	4.478	45.045
21	2.485	2.396	3.125	3.342	2.509	3.205	2.341	2.899	2.312	24.614	3.560	3.470	3.276	2.557	3.205	2.341	3.120	2.855	3.455	3.507	31.346
22	2.485	3.403	3.125	2.342	2.509	2.182	1.000	2.899	2.312	22.257	3.560	3.470	2.250	2.557	2.180	1.000	3.120	2.855	2.259	2.420	25.671
23	4.363	4.223	3.882	4.127	3.659	3.205	4.074	3.703	2.312	33.548	2.437	4.605	4.279	3.771	3.205	4.273	2.178	2.855	3.455	2.420	33.477

R	Transparansi										Akuntabilitas										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor
24	4.363	3.403	3.882	3.342	3.659	3.205	3.375	2.899	4.601	32.730	2.437	2.324	3.276	3.771	3.205	3.439	2.178	1.000	2.259	2.420	26.309
25	3.579	3.403	3.125	2.342	2.509	3.205	4.074	2.089	3.446	27.772	2.437	2.324	2.250	2.557	3.205	4.273	2.178	2.024	1.000	2.420	24.668
26	4.363	4.223	3.125	3.342	3.659	3.205	3.375	2.899	3.446	31.638	2.437	3.470	3.276	3.771	3.205	3.439	3.120	2.855	3.455	3.507	32.535
27	3.579	3.403	2.155	2.342	1.000	2.182	4.074	2.899	4.601	26.236	2.437	3.470	2.250	1.000	2.180	4.273	1.000	2.855	2.259	4.478	26.202
28	4.363	4.223	3.125	4.127	3.659	4.279	3.375	3.703	3.446	34.301	4.484	4.605	4.279	3.771	4.293	3.439	4.091	3.607	2.259	3.507	38.335
29	3.579	2.396	3.125	2.342	3.659	3.205	2.341	2.899	3.446	26.992	4.484	3.470	2.250	3.771	3.205	2.341	3.120	2.855	4.728	3.507	33.732
30	3.579	2.396	3.125	2.342	2.509	2.182	3.375	2.089	2.312	23.910	3.560	3.470	2.250	2.557	2.180	1.000	4.091	2.024	3.455	2.420	27.007
31	3.579	3.403	3.125	4.127	4.537	3.205	4.074	2.899	3.446	32.395	3.560	3.470	3.276	2.557	3.205	2.341	3.120	2.855	3.455	3.507	31.346
32	4.363	3.403	2.155	2.342	3.659	2.182	2.341	2.899	2.312	25.657	3.560	3.470	2.250	3.771	2.180	2.341	4.091	2.855	4.728	2.420	31.666
33	4.363	4.223	4.601	4.127	4.537	4.279	4.074	4.703	4.601	39.509	4.484	4.605	4.279	4.656	4.293	4.273	3.120	3.607	3.455	4.478	41.250
34	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	2.182	1.000	2.089	2.312	18.316	3.560	2.324	3.276	3.771	2.180	3.439	3.120	2.855	3.455	3.507	31.487
35	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	2.182	2.341	2.899	2.312	20.466	3.560	2.324	2.250	2.557	2.180	2.341	1.000	2.024	2.259	2.420	22.915
36	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	2.182	1.000	2.089	3.446	20.605	3.560	3.470	2.250	2.557	2.180	1.000	4.091	2.855	3.455	3.507	28.925
37	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	3.205	2.341	1.000	3.446	21.880	4.484	3.470	2.250	2.557	3.205	2.341	2.178	2.855	2.259	1.000	26.600
38	2.485	2.396	2.155	3.342	3.659	2.182	3.375	2.089	3.446	25.130	4.484	4.605	3.276	3.771	2.180	3.439	4.091	4.278	4.728	4.478	39.330
39	2.485	2.396	1.000	2.342	3.659	3.205	2.341	2.899	3.446	23.773	2.437	2.324	2.250	3.771	3.205	2.341	1.000	2.024	2.259	2.420	24.032
40	1.000	1.000	2.155	2.342	2.509	3.205	2.341	1.000	3.446	18.998	2.437	2.324	2.250	2.557	3.205	2.341	2.178	2.855	2.259	2.420	24.827
41	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	3.205	2.341	1.000	3.446	20.724	2.437	2.324	2.250	2.557	3.205	2.341	1.000	2.024	3.455	2.420	24.014
42	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	1.000	2.341	2.089	1.000	17.163	2.437	2.324	2.250	2.557	1.000	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	21.962
43	2.485	2.396	2.155	3.342	3.659	3.205	3.375	2.089	3.446	26.153	2.437	2.324	3.276	3.771	3.205	3.439	3.120	2.024	3.455	1.000	28.052
44	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	2.182	2.341	1.000	2.312	18.567	2.437	2.324	2.250	2.557	2.180	2.341	2.178	2.855	3.455	2.420	24.997
45	4.363	3.403	2.155	1.000	2.509	3.205	2.341	2.089	3.446	24.512	1.000	1.000	1.000	2.557	3.205	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	20.156
46	2.485	2.396	2.155	1.000	1.000	2.182	2.341	1.000	2.312	16.871	2.437	2.324	1.000	1.000	2.180	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	20.335
47	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	1.000	2.341	1.000	3.446	19.675	2.437	2.324	2.250	2.557	1.000	2.341	2.178	2.024	1.000	2.420	20.532

R	Transparansi										Akuntabilitas										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor
48	2.485	2.396	1.000	2.342	2.509	1.000	2.341	2.089	1.000	17.163	2.437	2.324	2.250	2.557	1.000	2.341	3.120	2.024	3.455	4.478	25.987
49	1.000	1.000	2.155	1.000	2.509	2.182	1.000	1.000	2.312	14.158	2.437	2.324	1.000	2.557	2.180	1.000	2.178	1.000	2.259	2.420	19.354
50	3.579	3.403	3.125	2.342	3.659	3.205	3.375	2.089	2.312	27.090	4.484	3.470	2.250	3.771	3.205	3.439	2.178	2.024	3.455	2.420	30.697
51	2.485	2.396	2.155	3.342	2.509	2.182	1.000	2.089	2.312	20.471	2.437	2.324	3.276	2.557	2.180	1.000	2.178	1.000	2.259	2.420	21.630
52	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	3.205	2.341	1.000	3.446	21.880	2.437	2.324	2.250	2.557	3.205	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	24.167
53	1.000	2.396	2.155	2.342	2.509	3.205	2.341	1.000	3.446	20.394	2.437	2.324	2.250	2.557	3.205	2.341	2.178	2.024	1.000	2.420	22.737
54	2.485	2.396	3.125	2.342	3.659	3.205	1.000	2.089	2.312	22.613	1.000	1.000	2.250	3.771	3.205	1.000	1.000	1.000	2.259	2.420	18.905
55	3.579	3.403	2.155	2.342	3.659	2.182	2.341	1.000	3.446	24.107	3.560	3.470	2.250	3.771	2.180	2.341	3.120	2.024	2.259	1.000	25.975
56	2.485	2.396	2.155	3.342	2.509	2.182	2.341	2.089	2.312	21.812	2.437	2.324	3.276	2.557	2.180	2.341	1.000	2.024	2.259	2.420	22.818
57	2.485	2.396	2.155	2.342	2.509	2.182	2.341	2.089	3.446	21.946	2.437	2.324	2.250	2.557	2.180	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	23.142
58	2.485	3.403	2.155	2.342	2.509	1.000	2.341	2.089	1.000	19.326	1.000	2.324	2.250	2.557	1.000	2.341	2.178	1.000	3.455	2.420	20.525
59	3.579	4.223	3.882	3.342	4.537	4.279	3.375	3.703	3.446	34.366	4.484	3.470	3.276	4.656	4.293	3.439	1.000	2.855	3.455	3.507	34.435

Lampiran 3 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Frequency Table Pengelolaan Dana Hibah

Item Soal 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	21	35.6	35.6	37.3
	3.00	21	35.6	35.6	72.9
	4.00	15	25.4	25.4	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	21	35.6	35.6	37.3
	3.00	21	35.6	35.6	72.9
	4.00	15	25.4	25.4	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	10.2	10.2	10.2
	2.00	18	30.5	30.5	40.7
	3.00	21	35.6	35.6	76.3
	4.00	9	15.3	15.3	91.5
	5.00	5	8.5	8.5	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	8.5	8.5	8.5
	2.00	19	32.2	32.2	40.7
	3.00	19	32.2	32.2	72.9
	4.00	14	23.7	23.7	96.6
	5.00	2	3.4	3.4	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.4	3.4	3.4
	2.00	22	37.3	37.3	40.7
	3.00	19	32.2	32.2	72.9
	4.00	13	22.0	22.0	94.9
	5.00	3	5.1	5.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	20	33.9	33.9	35.6
	3.00	26	44.1	44.1	79.7
	4.00	10	16.9	16.9	96.6
	5.00	2	3.4	3.4	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.9	11.9	11.9
	2.00	21	35.6	35.6	47.5
	3.00	15	25.4	25.4	72.9
	4.00	12	20.3	20.3	93.2
	5.00	4	6.8	6.8	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	15.3	15.3	15.3
	2.00	14	23.7	23.7	39.0
	3.00	23	39.0	39.0	78.0
	4.00	10	16.9	16.9	94.9
	5.00	3	5.1	5.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	16	27.1	27.1	28.8
	3.00	27	45.8	45.8	74.6
	4.00	13	22.0	22.0	96.6
	5.00	2	3.4	3.4	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Frequency Transparansi

Item Soal 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	31	52.5	52.5	57.6
	3.00	16	27.1	27.1	84.7
	4.00	8	13.6	13.6	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	6.8	6.8	6.8
	2.00	30	50.8	50.8	57.6
	3.00	14	23.7	23.7	81.4
	4.00	10	16.9	16.9	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	16.9	16.9	16.9
	2.00	24	40.7	40.7	57.6
	3.00	18	30.5	30.5	88.1
	4.00	4	6.8	6.8	94.9
	5.00	3	5.1	5.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	10.2	10.2	10.2
	2.00	30	50.8	50.8	61.0
	3.00	13	22.0	22.0	83.1
	4.00	9	15.3	15.3	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	31	52.5	52.5	57.6
	3.00	17	28.8	28.8	86.4
	4.00	7	11.9	11.9	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.9	11.9	11.9
	2.00	24	40.7	40.7	52.5
	3.00	21	35.6	35.6	88.1
	4.00	7	11.9	11.9	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	13.6	13.6	13.6
	2.00	31	52.5	52.5	66.1
	3.00	12	20.3	20.3	86.4
	4.00	6	10.2	10.2	96.6
	5.00	2	3.4	3.4	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	16	27.1	27.1	27.1
	2.00	21	35.6	35.6	62.7
	3.00	15	25.4	25.4	88.1
	4.00	6	10.2	10.2	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	24	40.7	40.7	45.8
	3.00	24	40.7	40.7	86.4
	4.00	8	13.6	13.6	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Frequency Akuntabilitas

Item Soal 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	28	47.5	47.5	52.5
	3.00	19	32.2	32.2	84.7
	4.00	8	13.6	13.6	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	6.8	6.8	6.8
	2.00	26	44.1	44.1	50.8
	3.00	22	37.3	37.3	88.1
	4.00	7	11.9	11.9	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.9	11.9	11.9
	2.00	27	45.8	45.8	57.6
	3.00	17	28.8	28.8	86.4
	4.00	8	13.6	13.6	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	33	55.9	55.9	61.0
	3.00	17	28.8	28.8	89.8
	4.00	5	8.5	8.5	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	10.2	10.2	10.2
	2.00	23	39.0	39.0	49.2
	3.00	21	35.6	35.6	84.7
	4.00	9	15.3	15.3	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.9	11.9	11.9
	2.00	31	52.5	52.5	64.4
	3.00	15	25.4	25.4	89.8
	4.00	5	8.5	8.5	98.3
	5.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	15.3	15.3	15.3
	2.00	25	42.4	42.4	57.6
	3.00	16	27.1	27.1	84.7
	4.00	9	15.3	15.3	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	16	27.1	27.1	27.1
	2.00	18	30.5	30.5	57.6
	3.00	18	30.5	30.5	88.1
	4.00	4	6.8	6.8	94.9
	5.00	3	5.1	5.1	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Item Soal 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.1	5.1	5.1
	2.00	21	35.6	35.6	40.7
	3.00	28	47.5	47.5	88.1
	4.00	7	11.9	11.9	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

VAR00010

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	6.8	6.8	6.8
	2.00	30	50.8	50.8	57.6
	3.00	16	27.1	27.1	84.7
	4.00	9	15.3	15.3	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Descriptives**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Dana Hibah	59	17.778	45.102	27.94200	6.948323
Transparansi	59	14.158	42.430	24.95900	6.666076
Akuntabilitas	59	18.905	45.045	27.89125	6.349147
Valid N (listwise)	59				

Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

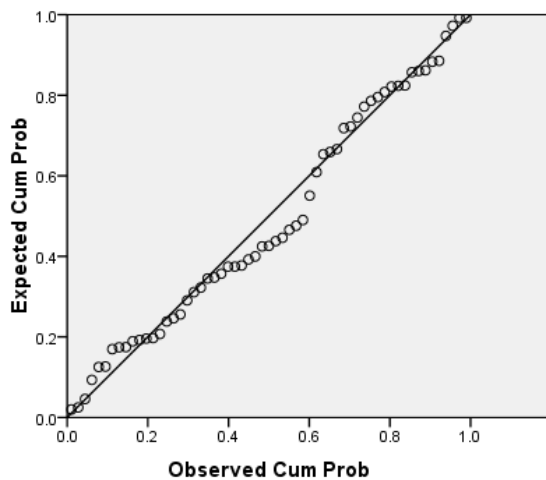
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pengelolaan Dana Hibah	Transparansi	Akuntabilitas
N		59	59	59
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	27.94200	24.83707	27.89125
	Std. Deviation	6.948323	6.575978	6.349147
Most Extreme Differences	Absolute	.088	.140	.141
	Positive	.088	.140	.141
	Negative	-.072	-.097	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.679	1.079	1.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.745	.195	.193

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah



Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.430	2.325
	Akuntabilitas	.430	2.325

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

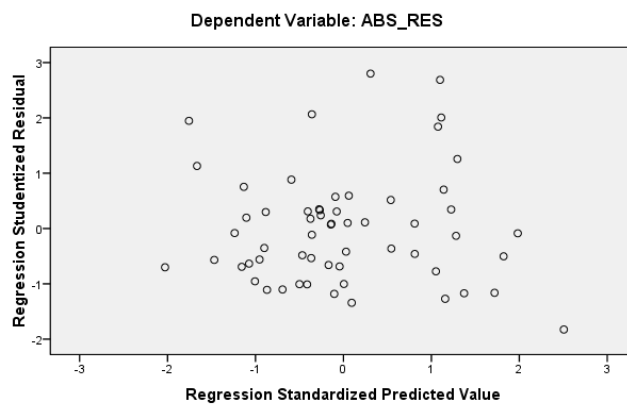
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.867	1.623		1.767	.083
	Transparansi	.112	.082	.276	1.376	.174
	Akuntabilitas	-.074	.086	-.174	-.869	.389

a. Dependent Variable: ABS_RES

Scatterplot



Lampiran 5 : Uji Regresi

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.560	4.609978

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1610.087	2	805.043	37.881	.000 ^a
	Residual	1190.106	56	21.252		
	Total	2800.193	58			

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.790	2.754		1.739	.088
	Transparansi	.348	.138	.334	2.513	.015
	Akuntabilitas	.519	.145	.474	3.567	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Hibah